

2026

TRIWULAN I

KINERJA BPOM DALAM ANGKA



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**



108 merek kosmetik, 408.054 pcs,
Nilai keekonomian mencapai lebih dari Rp26,2 miliar

Temuan produk tersebut didominasi oleh produk impor sebesar 65%

Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya
1,99%

Kosmetik Kedaluwarsa
1,47%

Penggunaan Tidak Sesuai Definisi Kosmetik
1,46%

Kosmetik Impor Tanpa SKI dan PIB
0,78%

KOSMETIK TANPA IZIN EDAR

KOSMETIK MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA/DILARANG

KOSMETIK MENGANDUNG BAHAN BERKUALITAS RENDAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Laboratorium Regional Samarinda
Pada Pengawasan dan Pengawasan Program
Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
Prabowo Subianto – Gibran Rakabumi
Makan Bergizi Gratis (MBG)

Diresmikan oleh,
Obat dan Makanan

KINERJA BPOM

DALAM ANGKA

TRIWULAN I

2026



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat Rahmad dan RidhoNya sehingga BPOM dapat terus hadir melayani dan melindungi masyarakat melalui jaminan Obat dan Makanan yang aman, berkualitas/bermanfaat, dan bermutu. Kinerja BPOM sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dituangkan dalam “Kinerja BPOM Dalam Angka”. Buku ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban BPOM dalam pelaksanaan anggaran pemerintah dan juga sumber informasi tentang hasil - hasil pengawasan Obat dan Makanan. Dalam buku ini disampaikan hasil pengawasan Obat dan Makanan baik yang dilakukan BPOM sendiri maupun bermitra dengan pemangku kepentingan yang mencakup standardisasi, evaluasi *pre-market*, hingga pengawasan *post-market* yang disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Sampai dengan triwulan I tahun 2026, beberapa kinerja yang telah dicapai BPOM di antaranya adalah persetujuan 48.397 nomor izin edar, pemeriksaan terhadap 4.060 sarana produksi dan sarana distribusi, pengujian 7.785 sampel, 15 perkara, dan 94 pelaksanaan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi.

Di tengah dinamika global dan tantangan pengawasan yang semakin kompleks, termasuk isu-isu krusial seperti maraknya peredaran obat ilegal dan pangan yang tidak aman, BPOM semakin memperkuat upaya pengawasan dan penegakan hukum. Kasus-kasus besar seperti peredaran obat-obatan yang mengandung zat berbahaya dan skandal impor pangan ilegal menunjukkan betapa pentingnya peran BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat. Dengan inovasi teknologi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, BPOM berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. BPOM juga aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan mendukung pelaku usaha, termasuk UMKM, agar dapat menghasilkan produk yang aman dan berdaya saing.

Terima kasih kepada seluruh jajaran BPOM serta mitra kerja atas kinerja yang dicapai sampai dengan triwulan I tahun 2026. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua mitra kerja BPOM sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana kegiatan agar terus berupaya bersama meningkatkan kinerja pada masa mendatang dalam upaya melayani dan melindungi masyarakat.

Jakarta, 30 April 2026

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,



TARUNA IKRAR



SAMBUTAN KEPALA BPOM RI.....I

DAFTAR ISI.....II

DAFTAR GAMBAR.....III

DAFTAR TABEL.....IV

HIGHLIGHT.....1

BAB 1 Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat, dan Mutu Produk Obat dan Makanan.....5

BAB 2 Penindakan di Bidang Obat dan Makanan.....12

BAB 3 Penyusunan Peraturan/Standar/Pedoman.....17

BAB 4 Analisis Kebijakan Obat dan Makanan.....21

BAB 5 Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan.....23

BAB 6 Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat.....26

BAB 7 Digitalisasi Pelayanan Publik.....37

BAB 8 Perkuatan Peraturan Perundang-Undangan Pengawasan Obat dan Makanan.....46

BAB 9 Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.....49

BAB 10 Kerjasama Internasional.....55

BAB 11 Sumber Daya Manusia.....60

BAB 12 Realisasi Anggaran.....62

Penutup.....64

Lampiran.....66

Gambar 1. Profil Registrasi Obat dan Makanan.....	5
Gambar 2. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/Dipublikasikan.....	5
Gambar 3. Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan.....	6
Gambar 4. Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan.....	6
Gambar 5. Profil Sertifikasi Obat dan Makanan.....	8
Gambar 6. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan.....	8
Gambar 7. Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan.....	9
Gambar 8. Peta Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan.....	12
Gambar 9. Rekomendasi Intelijen yang Dihasilkan.....	13
Gambar 10. Hasil Patroli Siber Obat dan Makanan.....	14
Gambar 11. Grafik Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan Seluruh Indonesia.....	15
Gambar 12. Jumlah Publikasi Siaran Pers/Penjelasan/Klarifikasi BPOM.....	26
Gambar 13. Jumlah Pelayanan Informasi kepada Media.....	26
Gambar 14. Tren Tonasi Pemberitaan Terkait Isu Obat dan Makanan.....	27
Gambar 15. Sebaran Media Pemberitaan Isu Obat dan Makanan.....	27
Gambar 16. Total Unggahan Media Sosial BPOM Berdasarkan Platform.....	28
Gambar 17. Engagement Per Platform.....	29
Gambar 18. Top Engagement Content terkait BPOM pada Platform Facebook, X, Instagram dan Youtube.....	30
Gambar 19. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan.....	31
Gambar 20. Jumlah Permintaan Informasi Publik.....	32
Gambar 21. Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan BPOM Berdasarkan Profesi.....	33
Gambar 22. Profil Media Permintaan Layanan Informasi dan Pengaduan BPOM.....	34
Gambar 23. Profil Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan oleh BPOM Berdasarkan Komoditi	34
Gambar 24. Topik Layanan Infomasi dan Pengaduan yang Diberikan atau Ditanyakan kepada BPOM.....	35
Gambar 25. Kunjungan FDA Australia ke Ruang BCC.....	38
Gambar 26. Nilai Indeks Domain dan Indeks SDI	39
Gambar 27. Hasil Penilaian Evaluasi SDI	40
Gambar 28. Diskusi Internal terkait Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Satu Data Indonesia.....	40
Gambar 29. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Satu Data bersama Sekretariat SDI	41
Gambar 30. Layanan Advokasi Hukum yang Diberikan oleh BPOM	47
Gambar 31. Tabel Perbandingan Indeks RB BPOM	50
Gambar 32. Pelaksanaan Reviu SOP Makro BPOM.....	52
Gambar 33. Kepala BPOM memberikan Kuliah Tamu di Harvard Medical School.....	55
Gambar 34. Kunjungan Kepala BPOM dalam Pendampingan Regulasi dan Ivestasi Three Corporation yang difasilitasi oleh KJRI Los Angeles.....	57
Gambar 35. Demografi Karyawan berdasarkan Penempatan Kerja.....	60
Gambar 36. Demografi Karyawan berdasarkan Gender.....	60
Gambar 37. Demografi Karyawan berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	60

Tabel 1. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan.....	7
Tabel 2. Profil Laporan Efek Samping.....	10
Tabel 3. Jumlah Penggunaan TTE Pada Aplikasi BPOM.....	42
Tabel 4. Realisasi Anggaran.....	62

WLA Extravaganza, Momen Pengakuan Global WHO di 25 Tahun Pengabdian BPOM



BPOM menggelar kegiatan “WLA *Extravaganza: The Power of Influence*” pada Kamis (29/01/2026). Kegiatan ini menjadi penanda atas pengakuan global untuk sistem regulatori Indonesia, melalui penetapan BPOM sebagai WHO *Listed Authority* (WLA) untuk vaksin.

Penetapan BPOM sebagai WLA mencerminkan kepercayaan dunia terhadap sistem regulatori Indonesia yang dinilai setara dengan standar internasional dan dibangun melalui kolaborasi lintas sektor serta lintas generasi. WHO secara resmi menetapkan status BPOM sebagai WLA untuk fungsi vaksin pada Desember 2025. Dengan capaian tersebut, Indonesia tercatat sebagai negara berkembang pertama yang meraih status WLA, di antara 38 negara maju yang telah lebih dulu memperoleh status tersebut. Status ini menempatkan BPOM pada posisi yang semakin strategis dalam ekosistem vaksin global.

BPOM Canangkan Program Perkuatan Penanganan Obat dan Makanan Palsu



BPOM kembali menegaskan komitmennya dalam melindungi masyarakat dari bahaya obat dan makanan palsu melalui Deklarasi Komitmen Bersama dan Pencanangan Program Perkuatan Penanganan Obat dan Makanan Palsu, Kamis (5/2/2026). Kegiatan yang mengusung tema “Unlock The Counterfeit Product Information” dan dihadiri oleh lintas sektor terkait dari kementerian/lembaga, asosiasi pelaku usaha, komunitas, dan akademisi bertujuan mengintegrasikan penanganan produk palsu menjadi sistem yang terpadu dan komprehensif.

Kegiatan ini merupakan upaya guna meningkatkan perlindungan masyarakat sebagai konsumen obat dan makanan dari risiko kesehatan, kerugian ekonomi, serta dampak sosial akibat peredaran produk palsu. Tak hanya itu, deklarasi ini juga memperkuat perlindungan bagi pelaku usaha yang menjalankan praktik usaha sesuai ketentuan, melalui penguatan kolaborasi dan keterbukaan informasi, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengenali, menghindari, dan melaporkan dugaan obat dan makanan palsu yang beredar.

Pada kesempatan ini, BPOM juga menyerahkan sertifikat CPOTB Tahap 1 kepada UMKM anak angkat, yakni PT Rejeki Tujuh Alam sebagai anak angkat PT Bintang Toedjoe dan sertifikat Nomor Izin Edar (NIE) untuk PT Pharmacia Herbal sebagai anak angkat PT Royal Medicalink. *Kick-off* ini juga dirangkaikan dengan Talkshow “*Collaborate to elevate: UMKM OBA dan Kosmetik Bangkit, Berdaya, Mendunia*”.

BAB 1



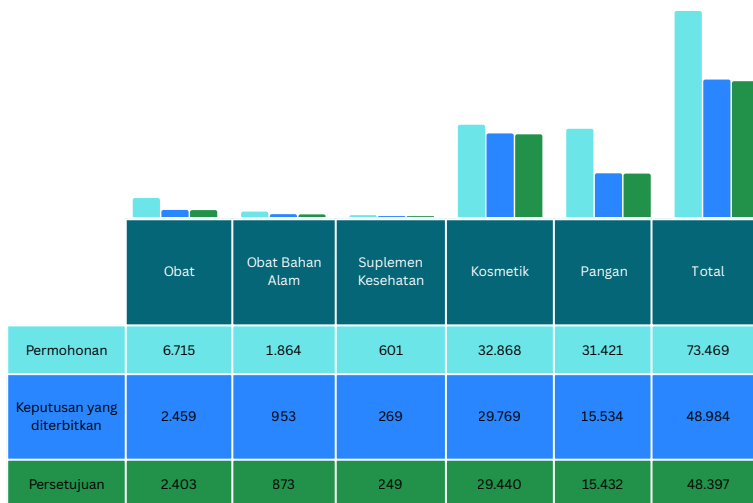
Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat, dan Mutu Produk Obat dan Makanan

PENGAWASAN *PRE-MARKET*

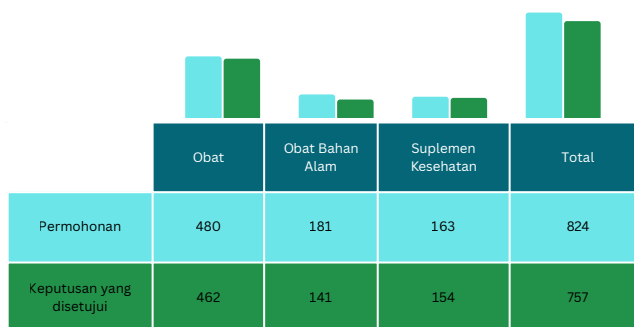
Sebelum Obat dan Makanan diproduksi atau diimpor dan diedarkan di wilayah Indonesia, Obat dan Makanan harus melalui registrasi oleh BPOM untuk dievaluasi terkait aspek keamanan, khasiat dan mutu serta informasi melalui penandaan/label.

Sampai dengan triwulan I tahun 2026, telah diterbitkan 48.984 keputusan dan 48.397 persetujuan izin edar dari 73.469 berkas permohonan registrasi Obat dan Makanan.

Untuk melindungi masyarakat dari klaim yang menyesatkan, BPOM telah melakukan evaluasi rancangan iklan terhadap kebenaran klaim iklan khusus obat bebas, obat bebas terbatas, obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang telah mendapatkan izin edar sebelum ditayangkan atau diedarkan. Sampai dengan triwulan I tahun 2026, dari 824 permohonan persetujuan rancangan iklan, telah disetujui 757 (91,87%) iklan.



Gambar 1. Profil Registrasi Obat dan Makanan



Gambar 2. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/Dipublikasikan

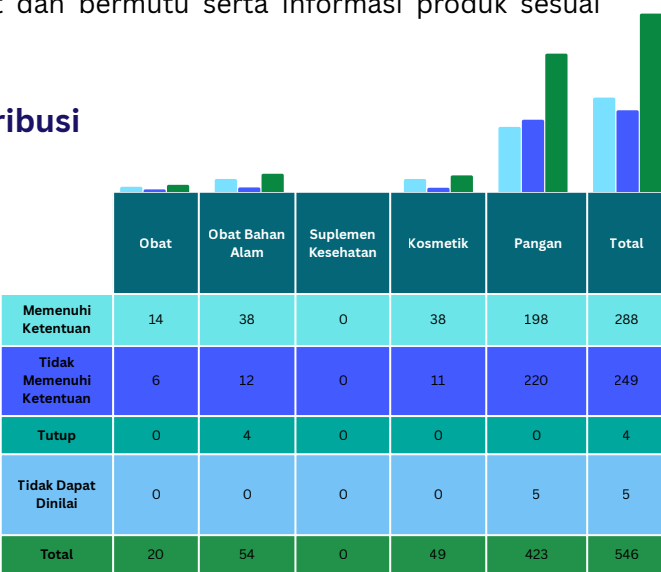
PENGAWASAN POST-MARKET

Pengawasan *post-market* dilakukan setelah produk beredar untuk memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu serta informasi produk sesuai dengan yang disetujui, dilakukan melalui :

Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi

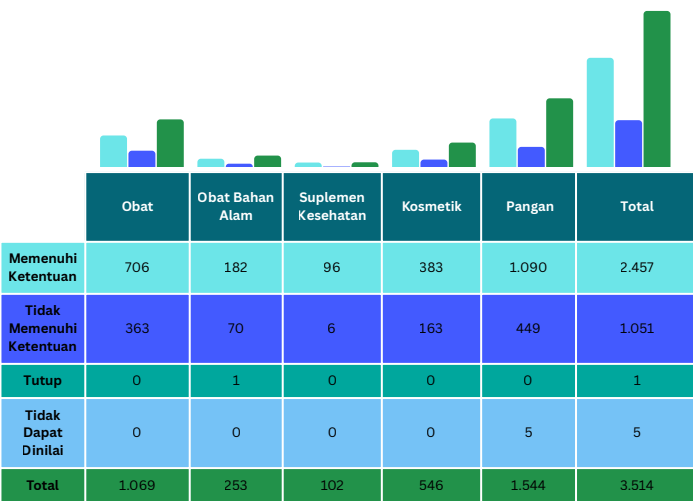
BPOM melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin kepatuhan implementasi Cara Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan Yang Baik.

Sampai dengan triwulan I tahun 2026 telah diperiksa sebanyak 546 sarana produksi Obat dan Makanan dengan hasil pemeriksaan sebanyak 249 (45,60%) sarana tidak memenuhi ketentuan.



Gambar 3. Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan

Sampai dengan triwulan I tahun 2026 telah diperiksa sebanyak 3.514 sarana distribusi Obat dan Makanan dengan hasil pemeriksaan sebanyak 1.051 (29,91 %) sarana tidak memenuhi ketentuan.



Gambar 4. Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan

Sampling dan Pengujian Laboratorium

Tabel 1. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan

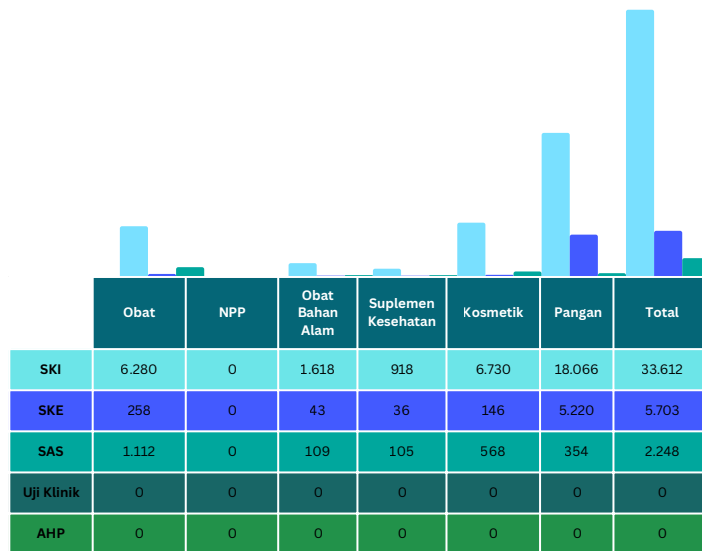
Komoditi	Metode Sampling	Jumlah Sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah Sampel Masuk Lab	Jumlah Sampel yang Diuji	Hasil Uji		Total TMS yang Diperiksa	Belum Selesai Uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
			TIE / Ilegal / Palsu	Kedaluwarsa	Rusak				MS	TMS			
		(a)	(b)			(c)	(d=a-b)	(e=f+g)	(f)	(g)	(h=b+g)	(i=d-e)	(j=b+e)
Obat	Targeted	2.633	3	0	1	40	2.629	1.370	1327	43	47	1.259	1.374
Obat Bahan Alam	Targeted	2.096	24	0	0	245	2.072	1.172	820	352	376	900	1.196
Obat Kuasi	Targeted	126	1	0	0	8	125	71	57	14	15	54	72
Suplemen Kesehatan	Targeted	540	1	0	0	21	539	296	266	30	31	243	297
Kosmetik	Targeted	4.289	3	1	2	808	4.283	2.306	1485	821	827	1.977	2.312
Pangan	Targeted	4.701	0	0	1	239	4.700	2.533	2254	279	280	2.167	2.534

Keterangan:
 TMK: Tidak Memenuhi Ketentuan
 TIE: Tanpa Izin Edar
 MS: Memenuhi Syarat
 TMS: Tidak Memenuhi Syarat

Sampai dengan triwulan I tahun 2026, dari 14.385 sampel yang disampling terdapat 7.785 sampel yang telah selesai diperiksa dan diuji laboratorium. Dari seluruh sampel yang telah diperiksa dan diuji, terdapat 1.539 (19,77%) sampel tidak memenuhi syarat (TMS).

Sertifikasi

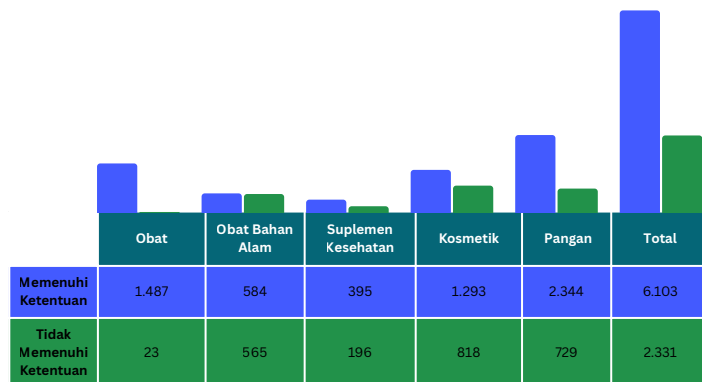
Dalam rangka mendorong ekspor dan impor pengawasan produk dan bahan baku yang masuk ke wilayah Indonesia, BPOM mengeluarkan Surat Keterangan Impor (SKI), Surat Keterangan Ekspor (SKE), *Special Access Scheme* (SAS), Uji Klinik, dan Analisis Hasil Pengawasan (AHP) Obat dan Makanan. Sampai dengan triwulan I tahun 2026 telah diterbitkan 33.612 SKI, 5.703 SKE, 2.248 SAS. Belum terdapat Uji Klinik dan AHP yang diterbitkan sampai dengan triwulan I tahun 2026.



Gambar 5. Profil Sertifikasi Obat dan Makanan

Pengawasan Iklan

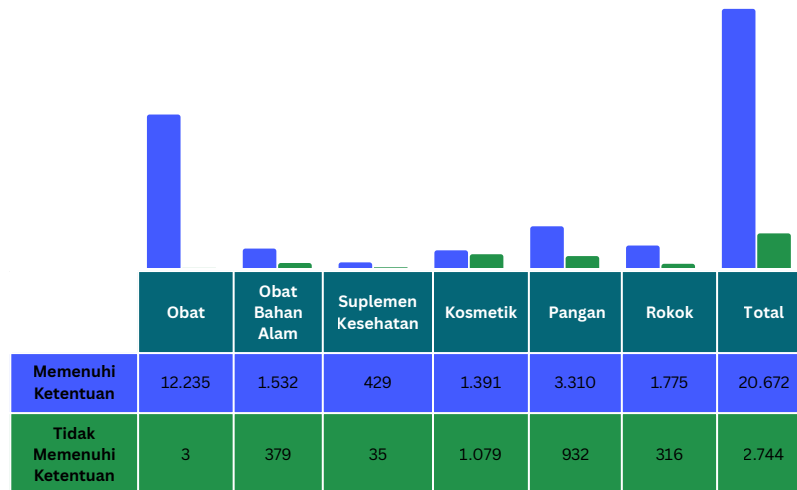
Untuk mencegah masyarakat mendapatkan informasi yang salah dan menyesatkan tentang produk Obat dan Makanan, BPOM melakukan pengawasan iklan produk di beberapa jenis media antara lain media cetak, televisi, radio, luar ruang dan *leaflet/* brosur. Sampai dengan triwulan I tahun 2026, dari 8.434 iklan Obat dan Makanan yang diawasi, 2.331 (27,64%) iklan tidak memenuhi ketentuan.



Gambar 6. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan

Pengawasan Label

BPOM juga mengawasi kesesuaian label produk Obat dan Makanan yang beredar dengan yang telah disetujui BPOM agar tidak memberikan informasi yang salah dan menyesatkan kepada masyarakat. Sampai dengan triwulan I tahun 2026, dari 23.416 label Obat dan Makanan yang diawasi, sebanyak 2.744 (11,72)% label tidak memenuhi ketentuan.



Gambar 7. Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan

Monitoring Efek Samping Obat, Monitoring Efek Samping Obat Bahan Alam, Monitoring Efek Samping Suplemen Kesehatan, Monitoring Efek Samping Kosmetik

Tabel 2. Profil Laporan Efek Samping

	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan Tindak Lanjut	%
Obat	7.379	0	0,00
Obat Bahan Alam	10	10	100,00
Suplemen Kesehatan	12	12	100,00
Kosmetik	273	248	90,84

Penggunaan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik oleh berbagai kalangan masyarakat, maka risiko timbulnya efek yang tidak diinginkan tetap ada. Oleh karena itu, BPOM melakukan evaluasi aspek keamanan produk yang beredar terhadap seluruh laporan efek samping yang diterima dari masyarakat dan/atau tenaga kesehatan, dengan membentuk tim/panitia Monitoring Efek Samping yang terdiri dari ahli farmokologi/farmakologi klinik, dokter spesialis kulit, dan beberapa tenaga ahli lainnya.

BAB 2



Penindakan di Bidang Obat dan Makanan

Peta Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan

Dalam melaksanakan strategi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan, diperlukan basis data yang solid untuk kemudian dianalisis dan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan. Untuk membangun basis data tersebut, BPOM menyusun aplikasi peta kerawanan kejahatan, yaitu peta yang menggambarkan kondisi terkini kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

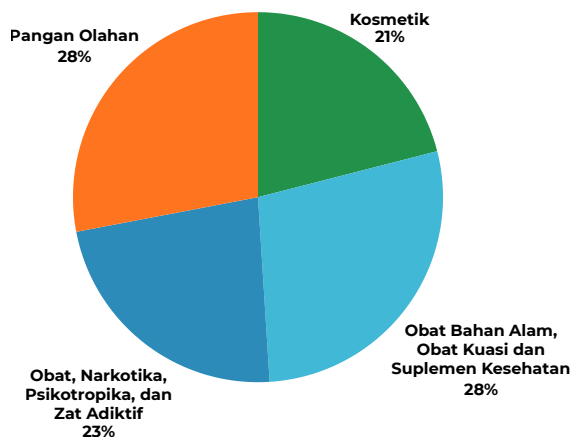


Gambar 8. Peta Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan

Sampai dengan triwulan I tahun 2026, data kasus yang sudah diverifikasi untuk menghasilkan data kerawanan kejahatan yang aktual sebanyak 2.501 kasus yang terdiri dari 950 kasus terkait obat, 428 kasus terkait obat bahan alam, 43 kasus terkait obat kuasi, 50 kasus suplemen kesehatan, 770 kasus terkait kosmetik dan 260 kasus terkait komoditi pangan olahan.

Hasil Kegiatan dan Operasi Intelijen

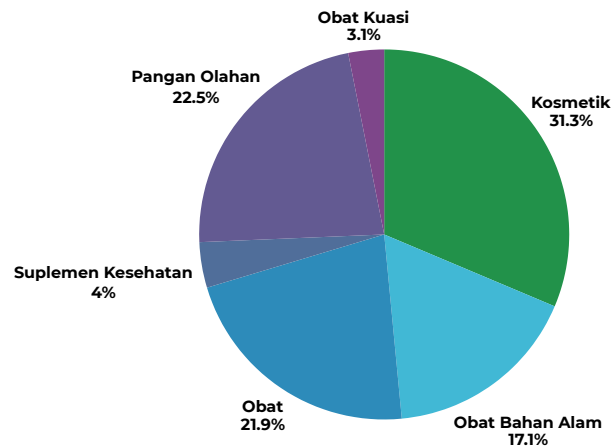
Peran BPOM dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan sangat strategis seiring dengan masih banyaknya temuan terkait Obat dan Makanan ilegal baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi ketahanan dan kesehatan masyarakat Indonesia. Salah satu upaya BPOM untuk meminimalisir hal tersebut adalah dengan melakukan kegiatan/operasi intelijen guna meningkatkan pengawasan peredaran Obat dan Makanan baik pada tahap *pre-market* maupun *post-market*. Kegiatan/operasi intelijen telah dilaksanakan di berbagai daerah dengan berbagai kasus komoditi di antaranya kasus obat, NAPPZA, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan baik yang berujung ditindaklanjuti dengan saksi administrasi maupun *Pro Justitia*.



Gambar 9. Laporan Informasi yang Dihasilkn s.d. Triwulan I Tahun 2026

Pada triwulan I tahun 2026, kegiatan intelijen yang dilaksanakan telah menghasilkan sebanyak 57 laporan informasi yang mencakup berbagai komoditas pengawasan meliputi obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik serta pangan olahan. Dari kegiatan operasi intelijen yang dilakukan pada triwulan I telah disusun sebanyak 3 Laporan Intelijen. Dari seluruh rangkaian kegiatan dan operasi intelijen yang dilakukan terdapat 1 rekomendasi yang ditindaklanjuti.

Dalam rangka meningkatkan pengawasan peredaran Obat dan Makanan di media daring, BPOM telah melakukan kegiatan patroli siber untuk melakukan pemantauan dan pelaporan terhadap penjualan produk Obat dan Makanan ilegal dan/atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.



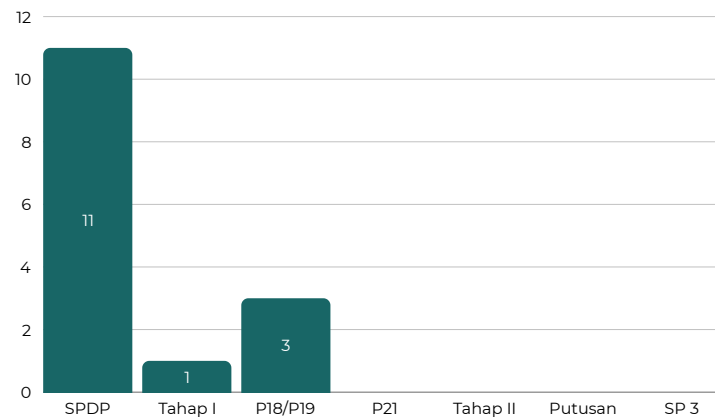
Gambar 10. Hasil Patroli Siber Obat dan Makanan s.d. Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan data hasil patroli siber Obat dan Makanan sampai dengan triwulan I tahun 2026, telah ditemukan 61.564 tautan yang teridentifikasi menjual Obat dan Makanan ilegal dan/atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan

Dalam rangka memberantas dan menertibkan peredaran produk Obat dan Makanan ilegal, BPOM secara terus menerus melakukan investigasi awal dan penyidikan kasus tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Upaya ini dilakukan secara mandiri maupun bersinergi dengan instansi penegak hukum lainnya dalam kerangka Operasi Gabungan Nasional dan Operasi Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal.

Sampai dengan triwulan I tahun 2026, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM telah menindaklanjuti 15 perkara. Sebanyak 11 perkara masih dalam tahap SPDP, 1 perkara pada tahap I, 3 perkara pada tahap P18/P19, dan belum terdapat perkara yang sudah sampai pada tahap P21, tahap II, tahap putusan pengadilan maupun SP3.



Gambar 11. Grafik Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan Seluruh Indonesia s.d. Triwulan I Tahun 2026

BAB 3



Penyusunan Peraturan/Standar/Pedoman

Dalam rangka mengawal mutu Obat dan Makanan, telah disusun peraturan/standar/pedoman di bidang Obat dan Makanan.

Obat

Pada tahun 2026, terdapat 5 peraturan/standar/pedoman terkait obat yang disusun oleh BPOM. Daftar 5 peraturan/standar/pedoman terkait obat beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan I sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan BPOM tentang Pengakuan Sentra Uji Klinik dan Sentra Uji Bioekivalensi (15%).
2. Revisi Peraturan Kepala BPOM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Laksana Registrasi Obat (75%).
3. Revisi Peraturan Kepala BPOM Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara dan Evaluasi Analisis Hasil Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (45%).
4. Revisi (Lampiran) Keputusan Kepala BPOM tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standar dan/atau Persyaratan Mutu Obat dan Bahan Obat (15%).
5. Standar CPOB terkait Aneks 5 Pembuatan Produk dari Darah atau Plasma Manusia (45%).

Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Terdapat 10 peraturan/standar/pedoman terkait obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang disusun oleh BPOM pada tahun 2026. Daftar 10 peraturan/standar/pedoman beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan I sebagai berikut:

1. Revisi Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (10%).
2. Rancangan Peraturan BPOM tentang Tata Laksana Persetujuan Uji Praklinik Obat Bahan Alam (40%).
3. Rancangan Peraturan BPOM tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Ekspor Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (80%).
4. Revisi Peraturan BPOM Nomor 34 Tahun 2022 Pengawasan Periklanan Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan (10%).
5. Revisi Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pedoman Klaim Suplemen Kesehatan (40%).
6. Revisi Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2024 tentang Persyaratan Mutu Suplemen Kesehatan (40%).
7. Revisi Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penarikan Pemusnahan Obat Tradisional menjadi Peraturan BPOM tentang Penarikan Pemusnahan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (40%).
8. Rancangan Peraturan BPOM tentang Cara Distribusi Kosmetik yang Baik (25%).
9. Revisi Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik (60%).
10. Rancangan Revisi Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bentuk dan Jenis Sediaan Kosmetika Tertentu yang Dapat diproduksi oleh Industri Kosmetika yang Memiliki Sertifikat Kosmetika Golongan B (40%).

Sampai dengan triwulan I tahun 2026 telah diselesaikan sebanyak 58 (lima puluh delapan) kajian yang terdiri dari 11 (sebelas) kajian di bidang obat bahan alam, 24 (dua puluh empat) kajian di bidang suplemen kesehatan dan 23 (dua puluh tiga) kajian di bidang kosmetik.

Pangan

Terdapat 6 peraturan/standar/pedoman terkait pangan olahan yang disusun oleh BPOM pada tahun 2026. Daftar 6 peraturan/standar/pedoman beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan I sebagai berikut:

1. Revisi Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan (25%).
2. Revisi Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2022 tentang Persyaratan Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan (20%).
3. Revisi Peraturan BPOM tentang Pangan untuk Keperluan Gizi Khusus (38%).
4. Rancangan Keputusan Kepala BPOM tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Kandungan Zat Gizi dari Bahan Pangan yang Digunakan (9%).
5. Rancangan Surat Keputusan Pentahapan Pemenuhan Persyaratan Batas Migrasi (50%).
6. Penyusunan RPP LIP (50%).

BPOM juga menyusun rekomendasi kebijakan terkait pangan olahan. Sampai dengan triwulan I tahun 2026 telah diselesaikan 66 rekomendasi kebijakan dan seluruhnya diselesaikan tepat waktu.

BAB 4



Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Analisis kebijakan Obat dan Makanan dilakukan untuk mendukung pengambilan keputusan sekaligus dasar penyusunan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Data hasil riset dan kajian yang berupa informasi dan rekomendasi dimanfaatkan untuk mengetahui dan meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Daftar riset dan kajian beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan I sebagai berikut:

1. Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Tahun 2026 (17%).
2. Pengukuran Indeks Kepatuhan (*Compliance Index*) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2026 (17%).
3. Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2026 (17%).
4. Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Berkelanjutan : Pengurangan Limbah dan Jejak Karbon Sepanjang Rantai Produksi (17%).

BAB 5



Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium

BPOM terus mendorong peningkatan kualitas laboratorium melalui pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL). SKL adalah standar yang ditetapkan BPOM sebagai acuan penilaian atau pengukuran kemampuan laboratorium BPOM dalam pelaksanaan pengujian, pengembangan pengujian, pengembangan baku pembandingan dan standar kompetensi.

Hingga triwulan I 2026, tingkat pemenuhan SKL mencapai 71,33%. Capaian ini merupakan agregat dari seluruh laboratorium yang ada di Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung pemenuhan SKL antara lain penyusunan tools penilaian SKL, monev pemenuhan SKL, dan bimbingan teknis peningkatan kompetensi pengujian kimia dan mikrobiologi.

Metode Analisis yang Dikembangkan

BPOM terus mengembangkan metode analisis Obat dan Makanan agar dapat melakukan pengujian keamanan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar sesuai dengan persyaratan terkini. Pengembangan metode analisis dilakukan untuk komoditi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, produk biologi, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, air, mikrobiologi dan biologi molekuler. Hasil pengujian digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan bahkan penindakan terkait pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Sampai dengan triwulan I tahun 2026 telah dikembangkan 11 metode analisis.

Baku Pembanding yang Dikembangkan

Pengembangan baku pembanding dapat dimanfaatkan oleh Balai Besar/Balai POM untuk memperkuat pengawasan Obat dan Makanan melalui pengujian laboratorium. Sampai dengan triwulan I tahun 2026 telah dikembangkan 5 baku pembanding.

Sampel yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu

BPOM selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholder* melalui pelayanan pengujian Obat dan Makanan termasuk sampel pengujian produk biologi dan sampel lot release vaksin dalam rangka pengawasan keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. Sampai dengan triwulan I tahun 2026, terdapat 48 sampel yang telah selesai uji dan memenuhi ketentuan *timeline*.

Alat Pengujian Laboratorium BPOM yang Dikalibrasi Sesuai Standar

Untuk menjamin validitas pengujian Obat dan Makanan di laboratorium diperlukan alat yang sudah terkalibrasi sesuai standar ISO IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi. Sampai dengan triwulan I tahun 2026, telah dilakukan kalibrasi terhadap 934 peralatan laboratorium Obat dan Makanan.

Jejaring Pengujian Obat dan Makanan

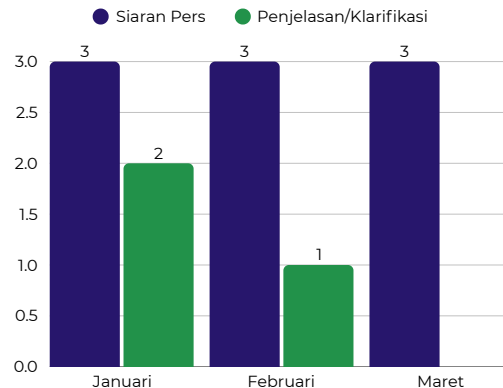
Kegiatan jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan merupakan kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi dan kapabilitas laboratorium uji, sharing informasi dan teknologi terkini yang sesuai dengan target dari jejaring tersebut. Kegiatan dapat berupa pertemuan, uji profisiensi, kolaborasi, pelatihan, *workshop*, FGD yang diikuti oleh laboratorium di lingkungan BPOM maupun eksternal sesuai lingkup pengujian/keahlian. Pada tahun 2026, BPOM menargetkan partisipasi dalam 56 jejaring laboratorium. Sampai dengan triwulan I tahun 2026, nilai partisipasi BPOM dalam jejaring laboratorium adalah 46,28.

BAB 6



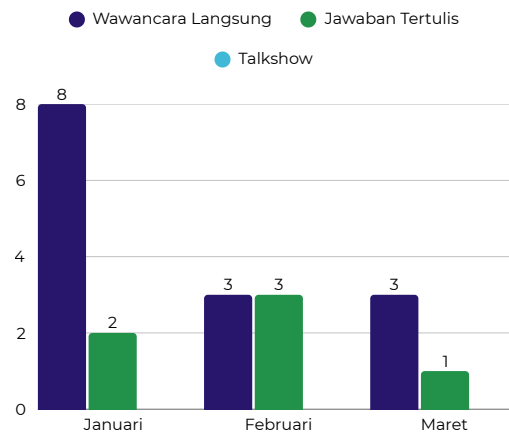
Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat

Sampai dengan triwulan I tahun 2026, BPOM telah menerbitkan 9 siaran pers dan 3 penjelasan/klarifikasi terkait isu Obat dan Makanan. Pembahasan isu bervariasi dari berbagai komoditas antara lain obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, dan umum. Seluruh siaran pers dan penjelasan/klarifikasi dipublikasikan melalui *website* dan media sosial BPOM.



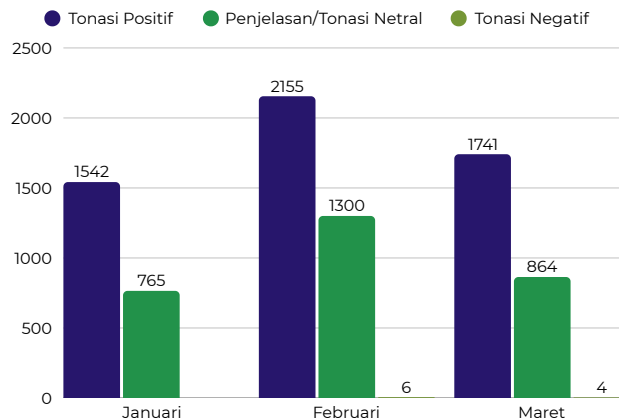
Gambar 12. Jumlah Publikasi Siaran Pers/ Penjelasan/ Klarifikasi BPOM s.d. Triwulan I Tahun 2026

BPOM melakukan kegiatan pelayanan informasi kepada media berupa wawancara, *talkshow* dan pemberian jawaban tertulis. Sampai dengan triwulan I tahun 2026, BPOM menerima 22 permohonan wawancara dari media dan sudah ditindaklanjuti. Dari hasil tindak lanjut tersebut, sebanyak 20 permohonan terlaksana (90,91%) dengan rincian 14 wawancara langsung dan 6 jawaban tertulis.



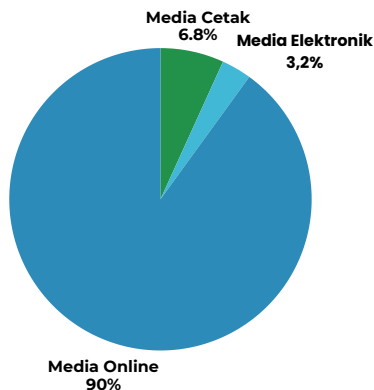
Gambar 13. Jumlah Pelayanan Informasi kepada Media s.d. Triwulan I tahun 2026

Sampai dengan triwulan I tahun 2026, terdapat 8.377 pemberitaan terkait Obat dan Makanan secara umum maupun BPOM. Dari seluruh pemberitaan tersebut, sejumlah 5.438 (64,92%) berita bertonasi positif, 2.929 (34,96%) berita bertonasi netral, dan 10 (0,12%) berita bertonasi negatif. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi media terhadap BPOM dan isu obat serta makanan cenderung positif, yang mencerminkan tingkat kepercayaan publik yang baik serta apresiasi terhadap kinerja dan peran BPOM dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia.



Gambar 14. Tren Tonasi Pemberitaan Terkait Isu Obat dan Makanan s.d Triwulan I Tahun 2026

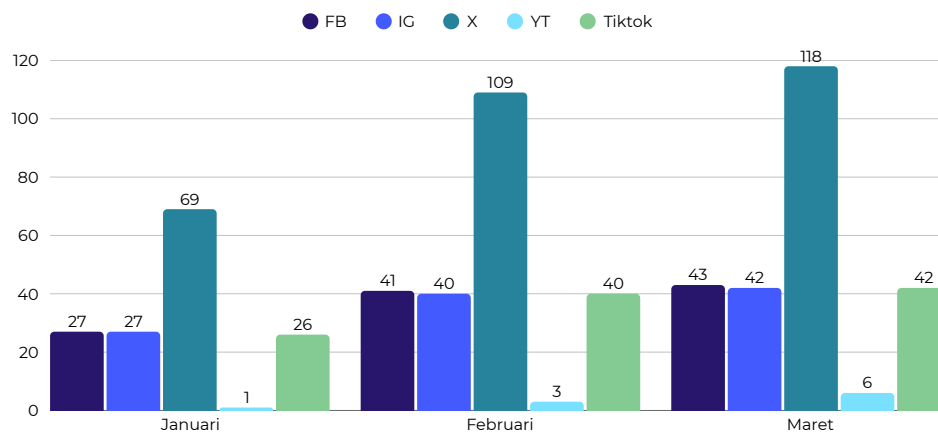
Berdasarkan jenis media, pemberitaan terkait Obat dan Makanan serta BPOM hampir seluruhnya berasal dari media *online* sebesar 7.540 (90,01%) berita, sedangkan media cetak sebesar 569 (6,79%) berita dan media elektronik sebesar 268 (3,20%) berita.



Gambar 15. Sebaran Media Pemberitaan Isu Obat dan Makanan s.d. Triwulan I Tahun 2026

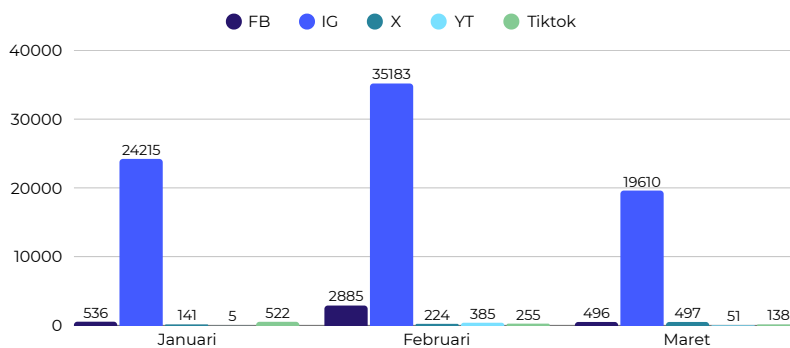
Pada triwulan I tahun 2026, aktivitas media sosial BPOM pada 5 *platform* media sosial yaitu Facebook, Instagram, X (Twitter), Youtube, dan Tiktok memiliki rata-rata 1-2 unggahan per hari. *Platform* X (Twitter) merupakan *platform* dengan aktivitas tertinggi sebanyak 296 unggahan dibandingkan dengan 4 media sosial lainnya. Aktivitas tertinggi kedua adalah Facebook dengan 111 unggahan, menyusul Instagram sebanyak 109 unggahan, Tiktok sebanyak 108 unggahan, serta Youtube sebanyak 10 unggahan.

Secara garis besar, total unggahan selama triwulan I pada berbagai *platform* adalah 634 konten, dengan rincian 150 unggahan di bulan Januari, 233 unggahan di bulan Februari, dan 251 unggahan di bulan Maret. Rincian jumlah unggahan sampai dengan triwulan I pada berbagai *platform* sebagai berikut:



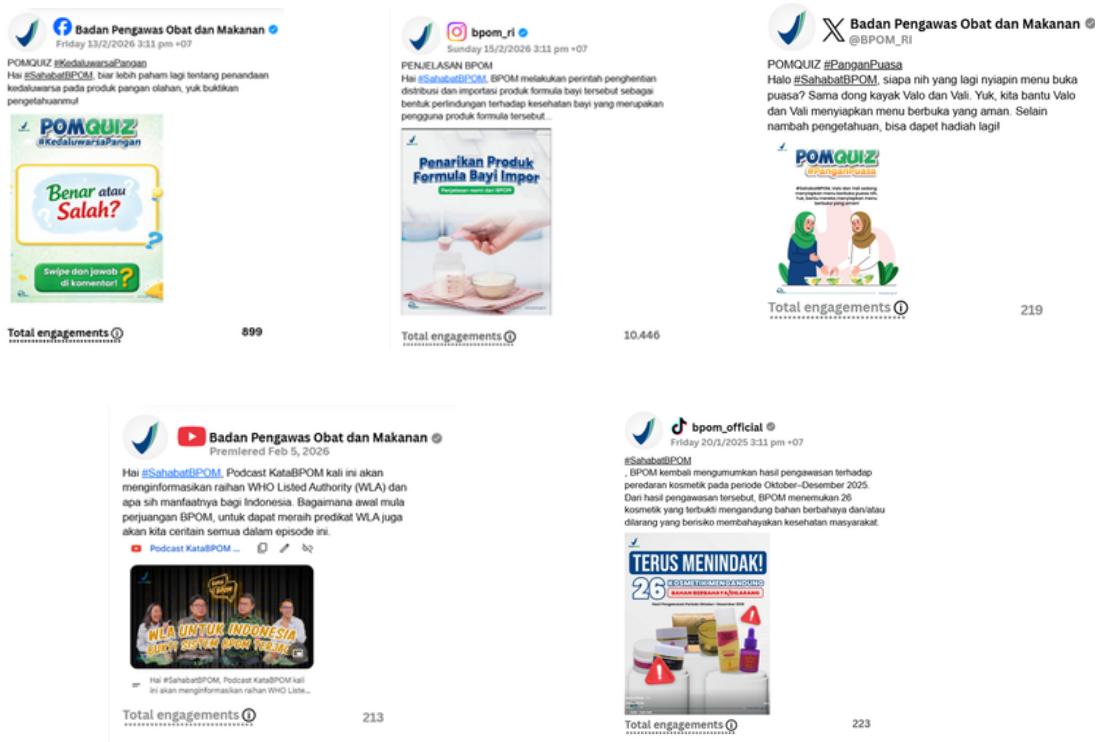
Gambar 16. Total Unggahan Media Sosial BPOM Berdasarkan *Platform* s.d Triwulan I Tahun 2026

Pada triwulan I tahun 2026, total *engagement* dari seluruh *platform* media sosial BPOM mencapai 85.143 interaksi. *Engagement* tertinggi terjadi pada bulan Februari dengan jumlah 38.932 interaksi, diikuti bulan Januari sejumlah 25.419 interaksi, dan bulan Maret sebesar 20.792 interaksi. Pertumbuhan jumlah *engagement* sampai dengan triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:



Gambar 17. *Engagement Per Platform s.dTriwulan I Tahun 2026*

Top engagement content terkait BPOM pada kelima *platform* selama triwulan I dapat dilihat pada gambar berikut:



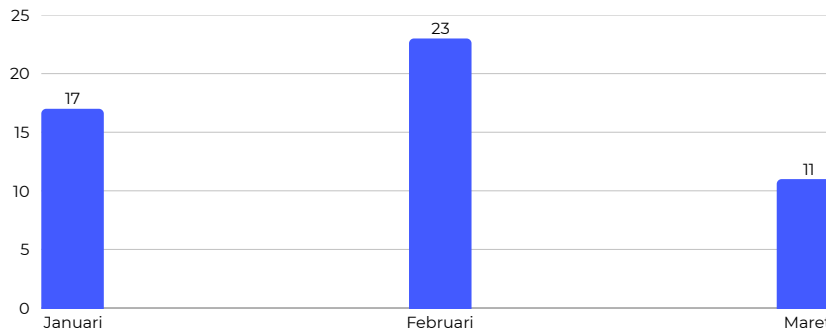
Gambar 18. *Top Engagement Content* terkait BPOM pada *Platform* Facebook, Instagram, X, Youtube dan Tiktok s.d Triwulan I Tahun 2026

Dalam rangka memperkuat edukasi dan literasi masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat, BPOM telah melaksanakan 94 kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) sampai dengan triwulan I tahun 2026. Berbagai bentuk KIE yang telah dilaksanakan yaitu pameran dan penayangan materi KIE melalui *whatsapp blast*, media sosial, dan *subsite* ULPK BPOM.



Gambar 19. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan s.d Triwulan I Tahun 2026

Sampai dengan triwulan I tahun 2026, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan BPOM telah menerima 51 permintaan informasi dari pemohon informasi publik. Profil pemohon informasi berdasarkan profesi yaitu pelajar/mahasiswa (80,39%), wartawan (11,77%), PNS/TNI/POLRI (1,96%), karyawan (1,96%), apoteker (1,96%), dan pelaku usaha (1,96%).

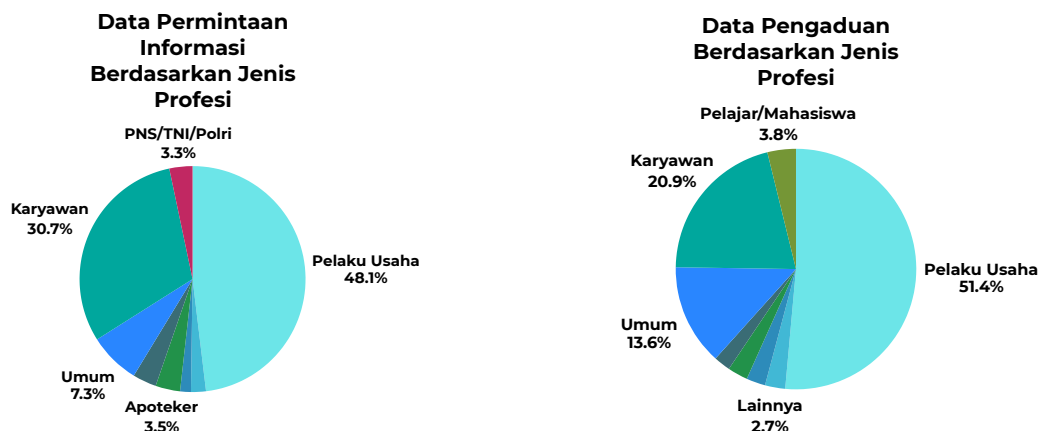


Gambar 20. Jumlah Permintaan Informasi Publik s.d. Triwulan I Tahun 2026

Dari 51 permintaan informasi publik yang diterima oleh BPOM, seluruh permintaan (100%) telah diselesaikan dan dikabulkan sepenuhnya. Seluruh permintaan informasi dapat diselesaikan sesuai jangka waktu penyelesaian yaitu tidak lebih dari 17 hari kerja dengan rata-rata waktu penyelesaian adalah 2,62 hari kerja.

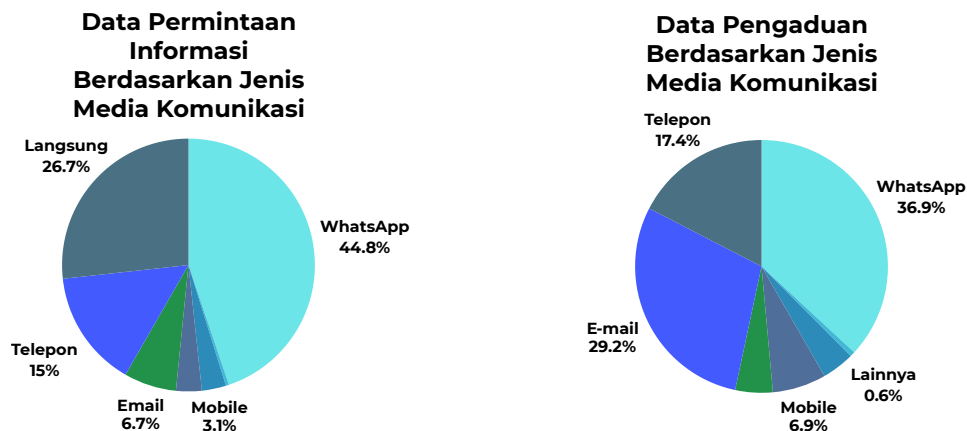
Berdasarkan data layanan informasi dan pengaduan masyarakat Obat dan Makanan sampai dengan triwulan I tahun 2026, BPOM telah melaksanakan layanan informasi dan pengaduan masyarakat melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Pusat dan 76 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia serta *contact center* HALOBPOM sebanyak 10.249 layanan, terdiri dari 9.623 (93,89%) layanan permintaan informasi dan 626 (6,11%) layanan pengaduan.

Profil profesi masyarakat yang mengakses layanan informasi sebagian besar berasal dari pelaku usaha sebanyak 4.628 (48,1%) layanan dan karyawan sebanyak 2.951 (30,7%) layanan. Adapun pengaduan sebagian besar dari pelaku usaha sebanyak 322 (51,4%) layanan dan karyawan sebanyak 131 (20,9%) layanan.



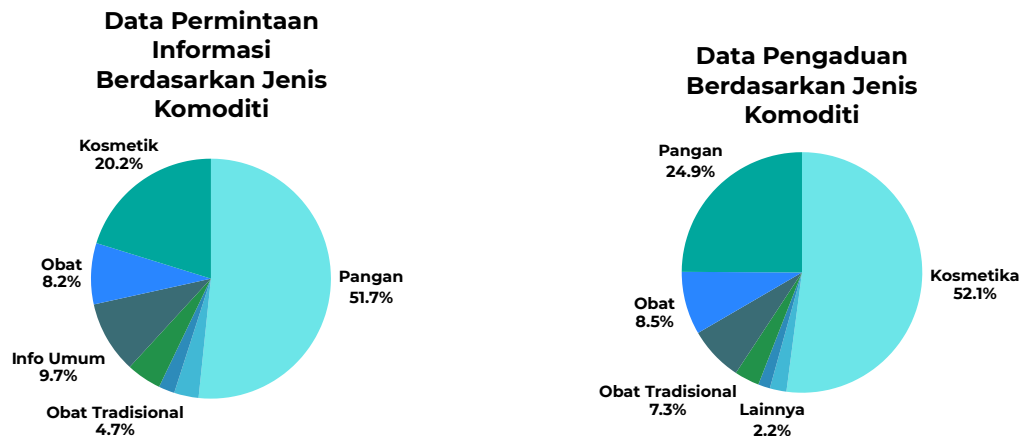
Gambar 21. Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan BPOM Berdasarkan Profesi

Media komunikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam mengakses layanan informasi yaitu melalui aplikasi WhatsApp sebanyak 4.313 (44,48%) layanan dan datang langsung (tatap muka) sebanyak 2.573 (26,7%) layanan. Adapun media yang paling banyak digunakan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan yaitu melalui WhatsApp sebanyak 231 (36,9%) layanan dan e-mail sebanyak 183 (29,2%) layanan.



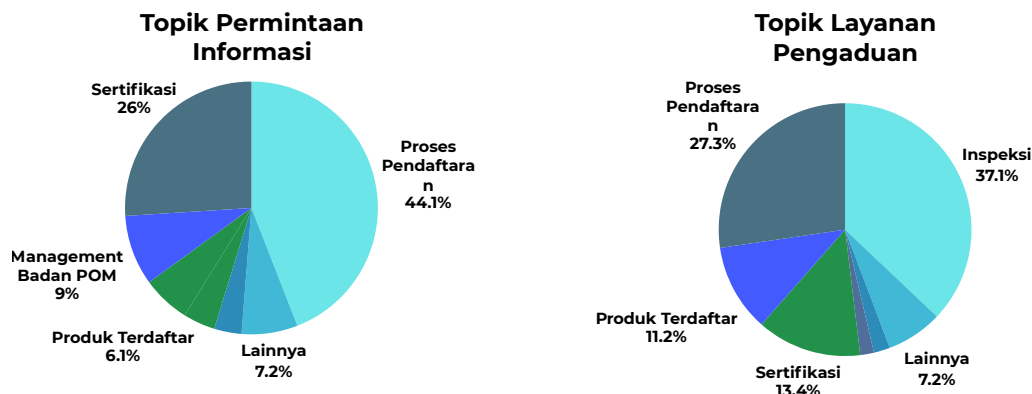
Gambar 22. Profil Media Permintaan Layanan Informasi dan Pengaduan BPOM

Berdasarkan komoditi, informasi yang banyak ditanyakan masyarakat yaitu terkait pangan sebanyak 4.971 (51,7%) layanan dan kosmetika sebanyak 1.945 (20,2%). Adapun komoditi yang banyak diadukan yaitu kosmetik sebanyak 326 (52,1%) layanan dan pangan sebanyak 156 (24,9%) layanan.



Gambar 23. Profil Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan oleh BPOM Berdasarkan Komoditi

Topik informasi yang paling banyak ditanyakan oleh masyarakat yaitu terkait proses pendaftaran sebanyak 4.241 (44,1%) layanan dan sertifikasi sebanyak 2.502 (26,0%) layanan. Topik lain yang sering ditanyakan antara lain informasi tentang manajemen BPOM, produk terdaftar, petugas pelayanan publik, pengujian, *public warning*, tanggal kedaluwarsa, efek samping, dan label halal. Adapun topik pengaduan yang banyak diajukan yaitu tentang inspeksi produk sebanyak 232 (37,1%) layanan dan proses pendaftaran sebesar 171 (27,3%) layanan.



Gambar 24. Topik Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan atau Ditanyakan kepada BPOM

BAB 7



Pembahasan Persiapan Penilaian Kinerja Simpul Jaringan BPOM 2026

Sebagai tindak lanjut atas hasil Penilaian Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial (SJIG) Tahun 2025 yang disampaikan pada tahun 2026 oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), BPOM bergerak cepat melakukan langkah persiapan untuk menghadapi penilaian tahun berikutnya.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa BPOM memperoleh nilai Indeks Kinerja SJIG sebesar 2,96 (status Berkembang), meningkat dari tahun sebelumnya. Capaian ini menjadi indikator positif atas upaya yang telah dilakukan, khususnya pada aspek teknologi. Namun demikian, evaluasi juga menggarisbawahi pentingnya penguatan pada aspek sumber daya manusia, tata kelola data, serta kelembagaan.

Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 13 Februari 2026, BPOM melaksanakan pertemuan koordinasi bersama Direktorat Kelembagaan dan Jaringan Informasi Geospasial BIG. Pertemuan ini difokuskan pada pembahasan langkah-langkah strategis sebagai bagian dari persiapan Penilaian Kinerja SJIG Tahun 2026.

Dalam pembahasan tersebut, disepakati sejumlah rencana aksi prioritas. BPOM akan memperkuat ketersediaan dan kualitas data geospasial melalui penambahan *dataset* baru berupa Peta Sebaran PBF, yang saat ini sedang dalam proses penetapan. Selain itu, pengembangan geoportal menjadi perhatian utama, termasuk rencana penerapan layanan metadata katalog berbasis standar OGC guna meningkatkan interoperabilitas data.

Di sisi lain, penguatan kapasitas SDM menjadi fokus penting melalui penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) dan peta jabatan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan (JF Surta), dengan dukungan pembinaan dari BIG. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan organisasi dalam mendukung penyelenggaraan informasi geospasial yang lebih optimal.

Seluruh upaya tersebut diarahkan untuk mencapai target peningkatan Indeks Kinerja SJIG BPOM Tahun 2026 sebesar 3,30 dengan status Berkembang. Dengan menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan dan perencanaan, BPOM menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas tata kelola informasi geospasial serta mendukung transformasi digital pemerintahan.

Laporan Pengelolaan Data Terbuka melalui Aktivitas Visitasi pada BPOM *Command Center* (BCC)

BPOM secara konsisten mengoptimalkan peran BPOM *Command Center* (BCC) sebagai instrumen pendukung kebijakan Data Terbuka (*Open Data*). Sebagai pusat integrasi data strategis, BCC berfungsi menjadi sarana diseminasi informasi yang transparan, yang memungkinkan berbagai pihak untuk memahami sistem pengawasan obat dan makanan berbasis teknologi terkini. Aktivitas visitasi ini merupakan wujud nyata komitmen BPOM dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik serta mendorong partisipasi aktif pemangku kepentingan dalam ekosistem digital pemerintahan.

Sepanjang periode triwulan pertama tahun 2026, BCC telah menerima kunjungan dari berbagai instansi lintas sektor dengan rincian sebagai berikut:

1. Balai Besar POM di Padang
2. CEO Drug Regulatory Authority of Pakistan (DRAP)
3. Universitas Indonesia
4. Ikatan Mahasiswa
5. Universitas Jenderal Soedirman
6. BPK dan CGA Arab Saudi
7. Australia FDA



Gambar 25. Kunjungan FDA Australia ke Ruang BCC

Kehadiran delegasi yang mencakup institusi pendidikan, instansi pemerintah, hingga lembaga internasional tersebut menegaskan posisi BCC sebagai pusat rujukan dalam pembelajaran tata kelola data di tingkat nasional maupun global. Melalui keterbukaan akses ini, BPOM berhasil memperkuat sinergi sektoral serta membangun kepercayaan publik terhadap validitas data pengawasan yang dihasilkan. BPOM berkomitmen untuk terus memfasilitasi kebutuhan edukasi dan pertukaran pengetahuan ini guna mendukung terwujudnya ekosistem data terbuka yang inklusif, tepercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat luas serta mitra strategis internasional.

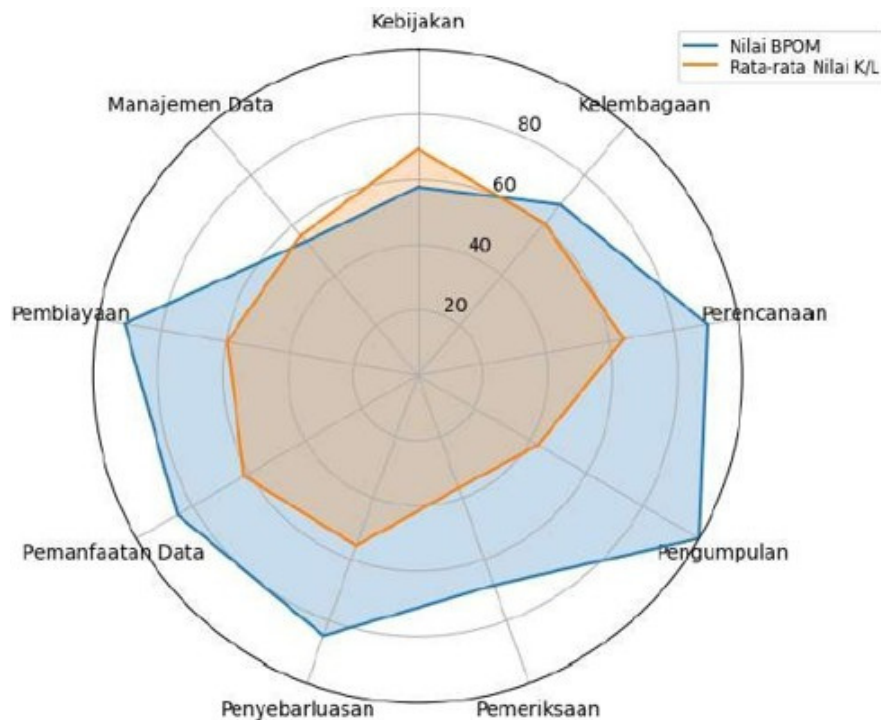
Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

Pada tahun 2021 dan 2022 Sekretariat Satu Data Indonesia telah mengadakan Asesmen Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Provinsi dan pada tahun 2023 telah melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan SDI (Indeks SDI). Berdasarkan Keputusan Menteri PPN/Bappenas No.93/M.PPN/HK/2025 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan SDI menjadi basis mekanisme Evaluasi Penyelenggaraan SDI tingkat Kementerian/Lembaga/Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk memetakan penyelenggaraan SDI di Instansi Pusat dan Instansi Daerah pada tahun 2024.

Pada akhir tahun 2025, hasil evaluasi penyelenggaraan SDI di BPOM sebesar 80,08 dengan kategori Baik. Nilai tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan penilaian yang dilaksanakan pada tahun 2024.

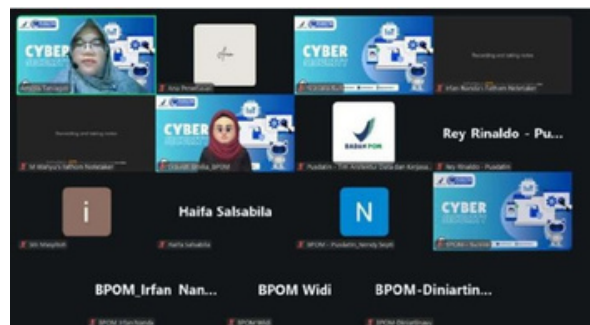
Nilai Indeks Domain dan Indeks SDI			
No	Indeks	Bobot	Nilai
1	Domain Kebijakan dan Kelembagaan	20%	64.08
2	Domain Penyelenggaraan SDI	56%	86.73
3	Domain Data Leadership	24%	79.02
Indeks Satu Data Indonesia			80.08

Gambar 26. Nilai Indeks Domain dan Indeks SDI



Gambar 27. Hasil Penilaian Evaluasi SDI

Selain itu, telah dilaksanakan pula diskusi internal terkait tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Satu Data Indonesia pada tanggal 21 Januari 2026 yang menghasilkan beberapa poin yang berkaitan dengan interoperabilitas data, dokumentasi serta unsur kebijakan data.



Gambar 28. Diskusi Internal terkait tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Satu Data Indonesia

Pada tanggal 18 Maret 2026 dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Satu Data yang mengundang narasumber dari Sekretariat Satu Data Indonesia. Hasil diskusi tersebut menghasilkan beberapa poin tindak lanjut antara lain:

1. Menyusun dan merevisi Kebijakan Satu Data BPOM mengacu pada Kepmen PPN/Bappenas
2. Menyusun SOP makro Satu Data yang berlaku untuk seluruh unit kerja dan UPT
3. Menerbitkan Surat Tugas bagi personel pengelola akun Portal SDI (minimal 3 orang)
4. Menyelenggarakan Forum SDI secara berkala dan menghasilkan Berita Acara kesepakatan daftar data, klasifikasi akses, dan penanganan redundansi
5. Menyiapkan usulan kode referensi yang relevan dengan tugas dan fungsi BPOM



Gambar 29. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Satu Data bersama Sekretariat Satu Data Indonesia.

Integrasi Sistem Informasi BPOM dengan Tanda Tangan Elektronik BSrE

Sebagai bentuk penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Badan POM telah bekerjasama dengan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) dalam mengimplementasikan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada aplikasi BPOM sejak 2018. Pada triwulan I tahun 2026, jumlah pegawai BPOM yang memiliki Sertifikat Elektronik dengan status aktif sebanyak 6.571. Jumlah transaksi TTE pada rentang tanggal 1 Januari sampai 31 Maret 2026 adalah 60.649, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah Penggunaan TTE pada Aplikasi BPOM s.d. Triwulan I Tahun 2026

No	Nama Aplikasi	Jumlah Transaksi TTE
1	Aplikasi Lot Release dan Pengujian Produk Biologi	207
2	Evortala	1
3	SIASN	27.702
4	e-BPOM	13.51
5	Sertifikasi CDOB	42
6	E-Standar Pangan	35
7	e-Sertifikasi	473
8	SIAPIK (Sistem Aplikasi Persetujuan Iklan Obat)	355

No	Nama Aplikasi	Jumlah Transaksi TTE
9	SIPT	10.034
10	SIREKA (Sistem Registrasi Iklan OTSK)	239
11	AERO (e-Registration Obat)	2.795
12	Aplikasi PMR	12
13	ASROT (e-Registration OTSK)	1.834
14	e-Reg (e-Registration Pangan Olahan)	585
15	Notifkos (Notifikasi Kosmetika)	2.814
16	Siap UK	11

Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik (TTE) di BPOM menghadapi tiga kategori kendala utama yang bersumber dari faktor pengguna, sistem internal BPOM, dan sistem eksternal BSRé. Berdasarkan data triwulan I tahun 2026, mayoritas kegagalan disebabkan oleh kesalahan pengguna, yakni salah memasukkan passphrased sebanyak 10.482 kasus dan sertifikat kadaluarsa sebanyak 256 kasus. Meskipun sistem internal BPOM tercatat stabil tanpa gangguan selama periode tersebut, terdapat 1.969 kegagalan proses TTE yang dipicu oleh gangguan teknis pada sistem BSRé.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BPOM melalui Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin) telah menyiapkan langkah penanganan strategis yang fokus pada edukasi dan penguatan infrastruktur. Upaya tersebut mencakup sosialisasi pengelolaan sertifikat kepada pengguna, percepatan pelayanan *reset passphrase* melalui portal Katalistik, serta optimalisasi sistem internal dengan jadwal pembaruan data otomatis setiap 30 menit. Selain itu, Pusdatin terus menjalin koordinasi teknis secara intensif dengan tim BSrE guna merespons gangguan eksternal secara cepat, memastikan kelancaran proses administrasi digital di lingkungan BPOM tetap terjaga.

BAB 8



Perkuatan Peraturan Perundang-Undangan Pengawasan Obat dan Makanan

1. Penyusunan Regulasi

Sampai dengan triwulan I tahun 2026, telah ditetapkan 5 Peraturan BPOM, 18 Keputusan Kepala BPOM, 4 Surat Edaran, serta 18 Rumusan Perjanjian.

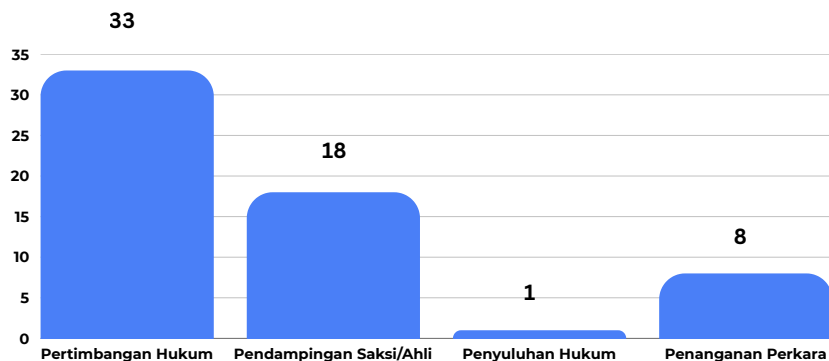
Daftar Peraturan BPOM yang telah diterbitkan sebagai berikut:

- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2025.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Batas Maksimal Cemaran Mikroba dalam Pangan Olahan.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pelaksanaan Farmakovigilans.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengawasan Pengelolaan Obat dan Bahan Obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Fasilitas Lain.

Layanan Advokasi Hukum

Setiap instansi pemerintah perlu mempertimbangkan aspek hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya agar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan implikasi hukum yang berisiko bagi organisasi.

Salah satu aspek hukum adalah layanan advokasi hukum yang terdiri dari pelaksanaan pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara hukum, pelaksanaan pendampingan kepada saksi/ahli serta pelaksanaan konsultasi dan penyuluhan hukum. Jumlah dan jenis layanan advokasi hukum yang sudah dilakukan oleh BPOM sampai dengan triwulan I tahun 2026 yaitu 60 layanan.



Gambar 30. Layanan Advokasi Hukum yang Diberikan oleh BPOM s.d. Triwulan I Tahun 2026

BAB 9



Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Penataan Organisasi

BPOM melakukan penataan organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan program pembangunan nasional. Penataan organisasi merupakan proses evaluasi terhadap struktur organisasi eksisting pada organisasi induk dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Berdasarkan hasil penataan UPT, telah dilakukan penyesuaian nomenklatur, klasifikasi, provinsi, lokasi, dan wilayah kerja UPT melalui Peraturan BPOM Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada BPOM. Berdasarkan peraturan tersebut maka pada tanggal 6 Maret 2026, BPOM resmi mengukuhkan 7 Loka POM baru, meningkatkan 3 Balai POM menjadi Balai Besar POM, dan meningkatkan klasifikasi 10 Loka POM menjadi Balai POM.

Tidak hanya pembentukan dan peningkatan klasifikasi, terdapat pengubahan lokasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan menjadi Loka POM di Kota Subulussalam untuk semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan penataan tersebut, maka jumlah UPT BPOM berubah menjadi 26 Balai Besar POM, 37 Balai POM, serta 20 Loka POM.

Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi

Kementerian PANRB telah menginformasikan Indeks RB Sementara BPOM sebesar 95,97. Nilai ini merupakan hasil sementara yang merupakan gabungan penilaian komponen RB General sebesar 88,18 dan komponen RB Tematik sebesar 7,79. Meskipun nilai ini belum mencapai target Indeks RB BPOM Tahun 2025 sebesar 96,30, namun BPOM memiliki potensi nilai akhir yang jauh lebih tinggi setelah penghitungan final selesai dilakukan karena nilai sementara tersebut belum termasuk nilai koefisien.

No	Penilaian	Bobot	Nilai		Ket
			2024	2025	
1	RB General (a)	100	86,82	88,18	'+ 1,36
	Koefisien (b)		1,74		
2	RB Tematik (c)	10	7,71	7,79	'+ 0,08
Indeks RB Sementara (a+c)		110	94,53	95,97*	'+ 1,44
Indeks RB (a+b+c)			96,27		

Keterangan: *) nilai belum terhitung nilai koefisien

Gambar 31. Tabel Perbandingan Indeks RB BPOM Tahun 2024 dan 2025

Terdapat kenaikan nilai pada komponen RB General maupun RB Tematik. Namun demikian, BPOM perlu menjaga agar tidak terdapat faktor-faktor yang dapat berdampak pada pengurangan nilai koefisien Indeks RB BPOM. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian PANRB, BPOM diperkirakan akan memperoleh peningkatan nilai koefisien berdasarkan tingkat kualitas implementasi kebijakan Meso.

Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Penyelenggaraan SPIP

Terdapat 6 (enam) Area of Improvement peningkatan kualitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di lingkungan BPOM, yaitu:

1. Evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan manajemen risiko agar lebih memadai khususnya pada optimasi pengelolaan risiko kecurangan (*fraud*)
2. Perbaikan proses manajemen risiko pada setiap lini termasuk perkuatan peran lini kedua dan lini ketiga dalam monitoring atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
3. Pembangunan atau melengkapi infrastruktur yang memadai untuk penyelenggaraan SPIP/Manajemen Risiko dan IEPK, baik dalam hal kebijakan sumber daya, sistem informasi dan infrastruktur pendukung lainnya
4. Penyesuaian kebijakan dan proses bisnis APIP terhadap Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025
5. Pelaksanaan tindak lanjut PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terkait FOPNL (*Front-of-Package Nutrition Labelling*) termasuk pengelolaan risikonya; dan
6. Pelaksanaan tindak lanjut peran pengawasan BPOM sesuai Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

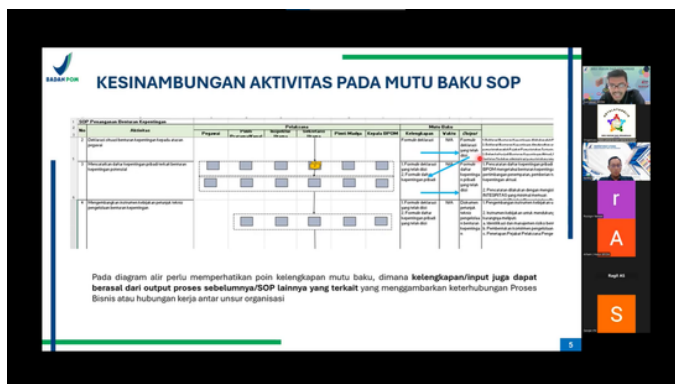
Penyusunan rencana aksi dari keenam Area of Improvement dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan unit kerja terkait dan menghasilkan 23 rencana aksi. Setiap kegiatan rencana aksi yang telah disepakati akan dikawal dan dipantau pelaksanaan tindak lanjutnya guna memastikan ketercapaian output sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.

Tinjau Ulang Dokumen SOP Makro BPOM

Tinjau ulang/reviu terhadap SOP makro di lingkungan BPOM telah dilaksanakan selama triwulan I tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan perbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam penerapan sistem manajemen pengawasan Obat dan Makanan terintegrasi.

Pembahasan dilakukan secara daring maupun *hybrid* dengan melibatkan Unit Koordinator dari dokumen SOP Makro, perwakilan Tim Koordinator Manajemen Representatif sesuai pembahasan dan perwakilan Unit Kerja Pusat dan UPT terkait.

Proses pembahasan mengacu pada prinsip-prinsip penyusunan dan tinjau ulang SOP dan merujuk pada prinsip SERA, yaitu penyederhanaan proses (*Simplification-S*), penghilangan proses yang tidak perlu (*Elimination-E*), pembuatan proses yang sama sekali baru (*Reengineering-R*), dan pengautomatisasian (*Automation-A*). Selama triwulan I 2026, terdapat 16 SOP Makro yang telah direviu dan/atau disusun sampai dengan tahap pengesahan oleh Sekretaris Utama sebagai Deputi Manajemen Puncak.



Gambar 32. Pelaksanaan Reviu SOP Makro BPOM

Pengembangan Pelayanan Publik

Sebagai salah satu bentuk pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta menindaklanjuti Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP), setiap UPP wajib melaksanakan SKM secara berkala minimal 1 kali dalam setahun. Pada tahun 2026, periode pelaksanaan SKM oleh UPP dijadwalkan pada bulan April sampai dengan Juni 2026. Pada triwulan I, telah dilaksanakan beberapa tahapan persiapan pelaksanaan SKM BPOM tahun 2026 yaitu:

1. Pengumpulan data jumlah pengguna layanan per jenis layanan tahun 2026

SKM BPOM dilakukan terhadap seluruh jenis layanan publik yang diselenggarakan oleh masing-masing UPP dengan mengacu pada daftar jenis layanan publik BPOM sesuai Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan BPOM. Sebagai tahap pertama dari persiapan pelaksanaan SKM, dilakukan pengumpulan data jumlah pengguna layanan per jenis layanan di masing-masing UPP. Pengumpulan data dilakukan melalui korespondensi yang dilanjutkan dengan desk dengan masing-masing UPP untuk validasi dan verifikasi.

2. Penetapan target responden survei dan penyiapan tautan survei

Selanjutnya, dilakukan penghitungan target responden survei per jenis layanan untuk masing-masing UPP berdasarkan formula Krejcie & Morgan sehingga didapat target minimal jumlah responden yang harus dipenuhi sesuai timeline pelaksanaan survei. Target per jenis layanan kemudian di-input di aplikasi SapaAPIP paralel dengan penyiapan tautan survei untuk masing-masing UPP.

BAB 10



Kerjasama Internasional

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, telah melaksanakan kunjungan kerja ke Amerika Serikat pada tanggal 30–31 Maret 2026. Kunjungan ini merupakan langkah proaktif BPOM dalam memperkuat diplomasi regulatori dan diplomasi sains di tingkat global, khususnya melalui kolaborasi dengan institusi akademik ternama dunia.

Selain itu, kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat reputasi BPOM sebagai otoritas regulator yang kredibel, sejalan dengan pencapaian status *WHO Listed Authority (WLA)*, serta sebagai upaya nyata dalam mendukung kemandirian kesehatan nasional melalui sinergi antara akademisi, industri, dan pemerintah (*academia-business-government*). Kegiatan Kepala BPOM selama kunjungan kerja tersebut terdiri dari:

Kuliah Tamu di Harvard Medical School: Urgensi Vaksin Maternal GBS

Pada tanggal 30 Maret 2026, Kepala BPOM memberikan kuliah tamu (*guest lecture*) di Harvard Medical School dengan paparan ilmiah berjudul “*Maternal Immunization against Group B Streptococcus – Immune Correlates, Microbiome Trade-offs, and Global Implementation Challenges*”. Dalam paparannya, Kepala BPOM menekankan urgensi penanganan infeksi *Group B Streptococcus (GBS)* yang secara global menyebabkan sekitar 390.000 kasus infeksi invasif setiap tahun, dengan dampak fatal berupa 100.000 kematian bayi dan lahir mati (*stillbirth*).



Gambar 33. Kepala BPOM memberikan Kuliah Tamu di Harvard Medical School

Kepala BPOM menjelaskan bahwa meskipun pendekatan *intrapartum antibiotic prophylaxis (IAP)* saat ini efektif menurunkan kasus awal, metode tersebut memiliki keterbatasan untuk perlindungan jangka panjang. Selain itu, penggunaan antibiotik yang masif memicu ancaman resistansi antimikroba (*silent pandemic*), di mana data BPOM menunjukkan resistansi terhadap antibiotik golongan penisilin di Indonesia telah mencapai sekitar 43%. Sebagai solusi strategis, BPOM mendorong pengembangan vaksin maternal GBS yang mampu melindungi dari *early onset disease*, *late onset disease*, hingga mencegah *stillbirth* sekaligus menjaga mikrobioma neonatal.

Dalam perspektif regulasi, Kepala BPOM menegaskan bahwa peran otoritas kini berkembang menjadi aktor strategis yang menyeimbangkan inovasi, keamanan, dan kepercayaan publik. BPOM juga memperkenalkan inisiatif *Conditional Marketing Authorization*, sebuah pendekatan baru yang memungkinkan pemberian izin bersyarat bagi produk kesehatan setelah melalui fase satu dan dua, guna mempercepat akses masyarakat dimana pengumpulan data fase tiga tetap berjalan.

Pertemuan dengan Prof. Alessio Fasano, Profesor Pediatri Harvard Medical School dan Senior Vice President Research and Development, Science and Medical Affairs, Mead Johnson Nutrition

Sebagai bagian dari pendalaman materi ilmiah, Kepala BPOM melakukan diskusi strategis dengan Prof. Alessio Fasano, profesor pediatri dan peneliti ternama dari Harvard Medical School sekaligus Senior Vice President Research and Development, Science and Medical Affairs, Mead Johnson Nutrition. Pertemuan ini membahas integrasi metodologi ilmiah terbaru ke dalam sistem pengawasan obat dan makanan. Fokus utama adalah bagaimana kebijakan pengawasan (*evidence-based policy*) harus adaptif terhadap perkembangan sains terkini guna menjamin setiap produk kesehatan/pangan olahan yang disetujui memiliki landasan ilmiah yang kuat serta risiko yang terkendali.

Pendampingan Regulasi dan Investasi Three Corporation bersama KJRI Los Angeles



Gambar 34. Kunjungan Kepala BPOM dalam Pendampingan Regulasi dan Investasi Three Corporation yang difasilitasi oleh KJRI Los Angeles

Dalam rangka penguatan iklim investasi, Kepala BPOM melakukan pertemuan dengan *Chief Operating Officer (COO)* Three Corporation yang difasilitasi oleh KJRI Los Angeles. Pertemuan ini secara khusus membahas permasalahan perizinan yang dihadapi perusahaan terkait indikasi penggunaan perantara tidak resmi di Indonesia yang menghasilkan dokumen registrasi tidak sah. Masalah ini telah menimbulkan kerugian finansial dan risiko reputasi bagi mitra luar negeri.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPOM memberikan klarifikasi bahwa sistem registrasi BPOM telah sepenuhnya terdigitalisasi, kredibel, dan transparan guna mencegah praktik penipuan oleh pihak ketiga. Sebagai langkah solutif yang konstruktif, BPOM berkomitmen membuka ruang penyelesaian melalui:

1. Pendampingan teknis dalam proses pengajuan ulang (*re-apply*) registrasi untuk 7 produk suplemen dan kosmetik Three Corporation agar sesuai dengan ketentuan;
2. Perbaikan dan pemenuhan kelengkapan dokumen pendukung sesuai prosedur operasional standar BPOM sebelum pengajuan ulang dilakukan;
3. Dukungan terhadap langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terindikasi melakukan penipuan dokumen untuk memulihkan kepercayaan mitra investasi.

Langkah ini memperkuat pesan bahwa Pemerintah Indonesia sangat terbuka terhadap investasi dan kerja sama internasional dengan tetap menegakkan prinsip tata kelola yang akuntabel dan berbasis regulasi.

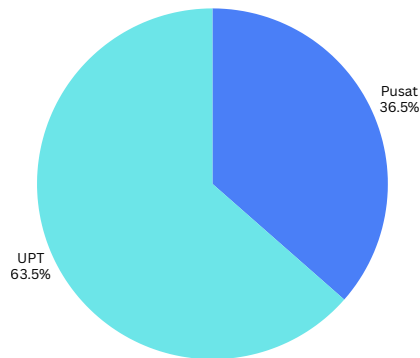
Secara keseluruhan, kunjungan kerja Kepala BPOM ke Amerika Serikat tersebut merupakan momentum penting dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai regulator obat dan makanan yang kredibel melalui pendekatan diplomasi sains. Kehadiran di Harvard Medical School merupakan pengakuan atas kapasitas keilmuan BPOM pasca capaian status WHO *Listed Authority* (WLA), sementara koordinasi dengan KJRI Los Angeles dan pihak industri membuktikan komitmen BPOM dalam melindungi masyarakat sekaligus mendukung iklim investasi melalui penyelesaian hambatan teknis secara transparan.

BAB 11

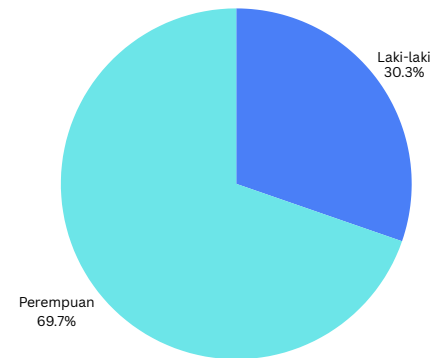


Sumber Daya Manusia

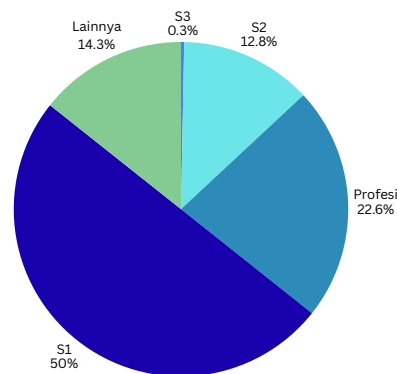
Sampai dengan triwulan I tahun 2026, total pegawai di BPOM sebanyak 6.507 pegawai yang terdiri dari 4.696 orang PNS, 771 CPNS, 1.037 PPPK, dan 3 POLRI. Sejumlah 2.373 pegawai (36,5%) ditempatkan di Pusat sementara 4.134 pegawai (63,5%) ditempatkan di UPT. Demografi pegawai di BPOM berdasarkan gender terdiri dari 1.972 orang (30,3%) laki-laki dan 4.535 orang (69,7%) perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 50% pegawai adalah lulusan S1, 22,6% pegawai lulusan Profesi, 12,8% pegawai lulusan S2, 0,3% lulusan S3 dan sisanya 14,3% lulusan SD/SLTP/SLTA/Diploma.



Gambar 35. Demografi Karyawan berdasarkan Penempatan Kerja



Gambar 36. Demografi Karyawan berdasarkan Gender



Gambar 37. Demografi Karyawan berdasarkan Pendidikan Terakhir

BAB 12



Realisasi Anggaran Sampai Dengan Maret 2026

Total anggaran BPOM Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2.354.321.946.000,- untuk seluruh kegiatan di pusat maupun daerah. Anggaran yang terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Anggaran tersebut tersebar untuk 33 Satker Pusat, 42 Balai Besar/Balai POM dan 31 Loka POM. Realisasi anggaran per Maret tahun 2026 sebesar, Rp394.893.643.125,00 (17,57%) yang terdiri dari realisasi anggaran untuk Satker Pusat Rp234.706.721.215,00 realisasi anggaran untuk seluruh Balai Besar/Balai POM Rp143.935.882.045,00 dan realisasi anggaran untuk Loka POM sebesar Rp16.251.039.865,00.

Tabel 4. Realisasi Anggaran s.d Maret 2026

Unit Kerja	Pagu	Realisasi	%
Pusat	1.273.455.406.000	234.706.721.215	18,43%
Balai Besar / Balai POM	835.206.771.000	143.935.882.045	17,23%
Loka Pom	138.380.981.000	16.251.039.865	11,74%
Total	2.247.043.158.000	394.893.643.125	17,57%

	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
Pagu	1.050.074.969.000	918.945.143.000	278.023.046.000	2.247.043.158.000
Realisasi	274.665.102.647	110.513.148.184	9.715.392.294	394.893.643.125
%	26,16%	12,03%	3,49%	17,57%

PENUTUP



Kinerja yang ditampilkan dalam laporan ini merupakan sebagian dari keseluruhan kinerja BPOM. Meskipun demikian, diharapkan para pemangku kepentingan dapat memperoleh gambaran yang jelas bahwa program dan kegiatan BPOM berorientasi pada pencapaian tujuan utama tahun 2026 yaitu melindungi kesehatan masyarakat Indonesia melalui jaminan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BPOM akan terus berupaya meningkatkan kinerjanya di masa mendatang dengan menjunjung tinggi integritas, komitmen, keterbukaan, perencanaan yang menyeluruh (termasuk penganggaran), pelaksanaan yang terukur, evaluasi dan analisis hasil yang objektif, serta penerapan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

LAMPIRAN 1



Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, BPOM secara rutin melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RKP BPOM Tahun 2026. Pemantauan ini mencakup perkembangan realisasi anggaran serta pencapaian sasaran kegiatan dan program, yang dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, pemantauan juga bertujuan untuk mengidentifikasi secara dini berbagai kendala yang dihadapi serta menetapkan upaya tindak lanjut yang diperlukan.

Pemantauan capaian RKP dilaksanakan secara bulanan. Adapun hasil pemantauan capaian RKP sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 disajikan dalam dokumen ini.

MATRIKS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2026	Satuan	Realisasi s.d TW I 2026	Capaian (%)
	BPOM	Indeks efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	55,39	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	81,11	Indeks	36,78	45,35%
		Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	81,00	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	89,19	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2026	Satuan	Realisasi s.d TW I 2026	Capaian (%)
	B POM	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	95,48	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks RB BPOM	95,97	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase inovasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dikawal sesuai standar	88,53	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu	87,50	Persentase	84,23	96,26%
		Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan	63,60	Persentase	43,77	68,82%
		Persentase Sediaan farmasi aman dan bermutu	76,50	Persentase	80,08	104,68%
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan	77,50	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Tingkat Kemandirian pelaku usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	37,17	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
A.	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Sediaan Farmasi aman dan bermutu	76,50	Persentase	80,08	104,68%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu	95,00	Persentase	95,41	100,43%
		Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	66,00	Persentase	68,33	103,53%
		Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	75,00	Persentase	89,40	119,20%
		Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	65,00	Persentase	62,59	96,29%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2026	Satuan	Realisasi s.d TW I 2026	Capaian (%)
		Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	90,00	Persentase	90,15	100,17%
		Persentase Pangan Industri Rumah Tangga aman dan bermutu	85,00	Persentase	78,30	92,12%
		Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	93,50	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	97,75	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	95,20	Dnkan	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	95,48	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	35,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83,75	Persentase	69,23	82,66%
		Indeks efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	55,39	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan	79,00	Persentase	70,00	88,61%
		Persentase fasilitas distribusi obat yang memenuhi ketentuan	67,00	Persentase	65,43	97,66%
		Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	87,00	Persentase	75,93	87,28%
		Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	86,60	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	82,00	Persentase	77,55	94,57%
		Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	66,00	Persentase	72,11	109,26%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2026	Satuan	Realisasi s.d TW I 2026	Capaian (%)
		Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	93,00	Persentase	94,12	101,20%
		Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	74,00	Persentase	70,15	94,80%
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	65,00	Persentase	52,86	81,32%
		Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan	40,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan	57,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	79,00	Persentase	70,60	89,37%
		Persentase iklan obat yang memenuhi ketentuan	88,33	Persentase	98,28	111,26%
		Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	67,00	Persentase	54,72	81,67%
		Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	83,00	Persentase	66,84	80,53%
		Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	61,00	Persentase	61,25	100,41%
		Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan	77,50	Persentase	76,28	98,43%
		Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	81,00	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks penanganan KLB Keracunan Pangan	84,00	Indeks	30,63	36,46%
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuan	77,00	Persentase	84,89	110,25%
		Persentase penurunan apotek yang melakukan penyerahan antibiotik tanpa resep dokter	9,70	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2026	Satuan	Realisasi s.d TW I 2026	Capaian (%)
		Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman	28,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase sentra uji klinik dan bioekivalensi yang memenuhi ketentuan	81,50	Persentase	33,33	40,90%
		Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan	63,60	Persentase	43,77	68,82%
		Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Program Sadar Jamu Aman	0,90	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat yang aman dan bermutu	90,31	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	88,90	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu	88,35	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	89,19	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase pengawalan hilirisasi Obat Pengembangan Baru yang dikawal sesuai standar	74,60	Persentase	58,67	78,65%
		Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	91,00	Persentase	91,09	100,10%
		Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar	100,00	Persentase	15,00	15,00%
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos	64,50	Persentase	4,17	6,47%
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan	90,50	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan	77,50	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase industri farmasi yang meningkat level maturitasnya	56,50	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2026	Satuan	Realisasi s.d TW I 2026	Capaian (%)
		Persentase Industri Obat Bahan alam dan Kosmetik yang Mencapai Tingkat Maturitas	34,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	21,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	87,10	Persentase	19,58	22,48%
		Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	77,88	Persentase	48,25	61,95%
		Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat	4,85	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	4,91	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4,94	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA	92,10	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA	81,86	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA	5,00	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA	3,00	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	90,28	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	82,24	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	5,00	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	2,99	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2026	Satuan	Realisasi s.d TW I 2026	Capaian (%)
		Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	91,54	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	79,97	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	5,00	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	3,50	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Penindakan	86,40	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan	75,00	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan	3,00	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan	2,91	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks RB BPOM	95,97	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,89	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik UPT	4,72	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Jumlah desa pangan aman	159	Jumlah	Progres 13,75%	Progres 13,75%
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	79	Jumlah	Progres 13,54%	Progres 13,54%
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	440	Jumlah	Progres 15,37%	Progres 15,37%
		Nilai AKIP UPT BPOM	79,53	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2026	Satuan	Realisasi s.d TW I 2026	Capaian (%)
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	4,99	Nilai	0,57	11,41%
		Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	84,83	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	42,05	Nilai	41,28	98,17%
		Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77,05	Persentase	11,25	14,60%
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97,99	Persentase	98,80	100,83%
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27,33	Persentase	0,48	1,75%
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	97,59	Persentase	98,18	100,60%
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100,00	Persentase	23,66	23,66%
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	41,47	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91,03	Persentase	16,59	18,22%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88,87	Persentase	79,67	89,65%
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	91,51	Persentase	98,39	107,52%
		Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	96,12	Persentase	49,89	51,90%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	100,00	Persentase	32,45	32,45%
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	99,80	Persentase	2,80	2,80%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2026	Satuan	Realisasi s.d TW I 2026	Capaian (%)
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	Persentase	36,74	36,74%
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,07	Persentase	95,05	99,98%
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,19	Persentase	66,31	70,40%
		Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,00	Persentase	97,23	102,35%
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,59	Persentase	98,28	102,82%
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,68	Persentase	94,62	98,89%
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97,46	Persentase	79,92	82,00%
		Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	29,52	Persentase	17,85	60,48%
		Tingkat efektivitas KIE Pangan Olahan	87,92	Nilai	91,67	104,27%
		Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,27	Nilai	86,82	97,25%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	100,00	Nilai	86,00	86,00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2026	Satuan	Realisasi s.d TW I 2026	Capaian (%)
1.2	Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Cegah Tangkal	2,85	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Cegah Tangkal	90,00	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Informasi Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Tervalidasi	97,00	Persentase	99,64	102,72%
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Cegah Tangkal Sesuai Standar	100,00	Persentase	36,00	36,00%
		Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal yang Ditindaklanjuti	64,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal	100,00	Nilai	80,00	80,00%
1.3	Intelijen Obat dan Makanan	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	2,91	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Jumlah Profil Jaringan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang terpetakan	4,00	Jumlah	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	84,80	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Intelijen Obat dan Makanan sesuai standar	100,00	Persentase	36,00	36,00%
		Persentase Rekomendasi Intelijen yang Ditindaklanjuti	81,00	Persentase	50,00	61,73%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	100,00	Nilai	92,00	92,00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2026	Satuan	Realisasi s.d TW I 2026	Capaian (%)
1.4	Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	2,99	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks pelayanan publik (IPP) Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	4,94	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	90,4	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai tata kelola pengawasan sarana dan produk obat bahan alam oleh UPT	95,00	Nilai	91,97	96,81%
		Nilai tata kelola pengawasan sarana dan produk suplemen kesehatan oleh UPT	93,00	Nilai	92,39	99,34%
		Persentase Industri Obat bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini	12,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	80,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	80,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan iklan obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	63,00	Persentase	100,00	158,73%
		Persentase keputusan hasil pengawasan iklan suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	76,50	Persentase	100,00	130,72%
		Persentase keputusan hasil pengawasan produk obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	70,00	Persentase	93,41	133,44%
		Persentase keputusan hasil pengawasan produk suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	70,00	Persentase	100,00	142,86%
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	70,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2026	Satuan	Realisasi s.d TW I 2026	Capaian (%)
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	80,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	93,50	Persentase	96,21	102,90%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Dit. Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan sesuai standar	100	Persentase	36,00	36,00%
		Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83,50	Persentase	61,11	73,19%
		Persentase UMKM OBA yang meningkat kapasitasnya untuk menghasilkan produk berdaya saing	60,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	100	Nilai	100,00	100,00%
1.5	Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	3,20	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	4,91	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Rekomendasi Terhadap Pengawasan Sarana IRTP	2,00	Jumlah	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	90,30	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan IRTP sesuai standar untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman	14,01	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2026	Satuan	Realisasi s.d TW I 2026	Capaian (%)
		Persentase Keputusan hasil pengawasan produksi pangan olahan yang ditindaklanjuti sesuai standar	100,00	Persentase	100,00	100,00%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan sesuai standar	100,00	Persentase	36,36	36,36%
		Persentase sarana produksi pangan fortifikasi skala kecil yang meningkat kepatuhannya terhadap regulasi	20,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase sarana produksi pangan olahan risiko tinggi yang memenuhi ketentuan wajib Program Manajemen Risiko	86,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang siap menerapkan peningkatan level pemenuhan regulasi secara proaktif	68	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	100,00	Nilai	100,00	100,00%
1.6	Pengawasan Kosmetik	Indeks Manajemen Risiko Dit. Pengawasan Kosmetik	3,06	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks pelayanan publik (IPP) Dit. Pengawasan Kosmetik	4,84	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Dit. Pengawasan Kosmetik	92,5	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Industri Kosmetik yang mengikuti Program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh	61,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	60,00	Persentase	100,00	166,67%
		Persentase keputusan hasil pengawasan iklan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	60,00	Persentase	61,59	102,65%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2026	Satuan	Realisasi s.d TW I 2026	Capaian (%)
		Persentase keputusan hasil pengawasan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	62,00	Persentase	76,82	123,90%
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	60,00	Persentase	100,00	166,67%
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana/fasilitas dan produk kosmetik oleh UPT sesuai ketentuan	94,00	Persentase	94,11	100,12%
		Persentase keputusan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu	94,40	Persentase	86,51	91,64%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Dit. Pengawasan Kosmetik sesuai standar	100	Persentase	36,36	36,36%
		Persentase pemenuhan ketentuan oleh BUPN kosmetik yang telah diintervensi	73,00	Persentase	79,31	108,64%
		Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	84,80	Persentase	100,00	117,92%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. Pengawasan Kosmetik	100	Nilai	100,00	100,00%
1.7	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	3,69	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	4,91	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Jumlah kajian isu distribusi obat dan bahan obat antar lembaga dan/atau stakeholder yang diselesaikan	10,00	Jumlah	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	91,6	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan di bidang distribusi dan penyerahan obat yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	89,71	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2026	Satuan	Realisasi s.d TW I 2026	Capaian (%)
		Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi dan fasilitas penyerahan obat yang diselesaikan sesuai standar	96,25	Persentase	100,00	103,90%
		Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi dan penyerahan obat dan NPP oleh UPT sesuai ketentuan	93,00	Persentase	90,38	97,18%
		Persentase keputusan penilaian fasilitas distribusi obat yang diselesaikan tepat waktu	97	Persentase	97,95	100,98%
		Persentase kesesuaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR	95,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	100	Persentase	36,00	36,00%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	100	Nilai	88,00	88,00%
1.8	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	3,69	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan KMEI ONPPZA	4,89	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Jumlah tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar yang dikomunikasikan	14,00	Jumlah	1,00	7,14%
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	90,84	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase hasil pengawasan keamanan, mutu, dan informasi Obat dan NAPPZA oleh UPT BPOM yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	92,94	Persentase	62,78	67,55%
		Persentase hasil pengawasan mutu Obat dan NPP yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	94,77	Persentase	66,67	70,35%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2026	Satuan	Realisasi s.d TW I 2026	Capaian (%)
		Persentase laporan pengawasan iklan dan penandaan obat NPP yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	96,70	Persentase	20,70	21,41%
		Persentase laporan pengawasan produk tembakau yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	88,10	Persentase	93,14	105,72%
		Persentase materi KIE di bidang obat yang disusun dan disosialisasikan sesuai rencana aksi	100,00	Persentase	100,00	100,00%
		Persentase Pelaku Usaha Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang melaporkan informasi produk sesuai ketentuan	59,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	100	Persentase	36,36	36,36%
		Persentase permohonan persetujuan iklan obat yang diselesaikan tepat waktu	89,59	Persentase	97,50	108,83%
		Persentase Surat Keterangan Impor Obat dan Bahan Obat; Analisis Hasil Pengawasan Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor; dan Certificate of Pharmaceutical Product (CPP) yang Diselesaikan Tepat Waktu	96,23	Persentase	95,91	99,67%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	100	Nilai	75,00	75,00%
1.9	Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	3,70	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	4,94	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Rekomendasi Terhadap Pengawasan PIRT	2,00	Jumlah	Akhir tahun	Akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2026	Satuan	Realisasi s.d TW I 2026	Capaian (%)
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	89,10	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan PIRT untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman	32,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Keputusan hasil pengawasan peredaran pangan olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan	100,00	Persentase	100,00	100,00%
		Persentase Keputusan hasil pengawasan sarana peredaran yang diselesaikan sesuai ketentuan	100,00	Persentase	100,00	100,00%
		Persentase KLB Keracunan Pangan yang teridentifikasi penyebabnya	80,00	Persentase	87,50	109,38%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan sesuai standar	100,00	Persentase	36,40	36,40%
		Persentase Sarana Peredaran yang Menerapkan SMKPO Peredaran sesuai perencanaan	64,00	Persentase	8,30	12,97%
		Persentase Surat Keterangan Ekspor/Impor Pangan yang diselesaikan tepat waktu	93,50	Persentase	94,20	100,75%
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Iklan Pangan Olahan Sesuai Ketentuan	74,00	Persentase	74,10	100,14%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	100,00	Nilai	75,00	75,00%
1.10	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	3,59	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	4,79	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	93,53	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2026	Satuan	Realisasi s.d TW I 2026	Capaian (%)
		Persentase Fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku yang diawasi sesuai standar	83,00	Persentase	15,87	19,12%
		Persentase industri farmasi yang dievaluasi sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan level maturitas	65,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi Obat dan NPP oleh UPT sesuai ketentuan	86,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase keputusan penilaian fasilitas produksi Bahan Baku Obat, obat, produk biologi, dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu	87,00	Persentase	71,43	82,10%
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	100	Persentase	36,00	36,00%
		Persentase Penilaian Hasil Pengawasan Kemandirian UPT Baru	83,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase sarana produksi obat JKN, bahan baku obat, dan obat high risk lainnya yang mematuhi persyaratan CPOB	79,00	Persentase	70,00	88,61%
		Persentase tahapan pemenuhan fasilitas produksi obat dan bahan baku obat pengembangan baru yang diterbitkan keputusan dalam rangka pengawasan	88,00	Persentase	66,67	75,76%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	100	Nilai	75,00	75,00%
1.11	Registrasi Pangan Olahan	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4,10	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik Registrasi Pangan Olahan	4,96	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Registrasi Pangan Olahan	96,68	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	89,75	Persentase	83,91	93,49%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2026	Satuan	Realisasi s.d TW I 2026	Capaian (%)
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Registrasi Pangan Olahan sesuai standar	100,00	Persentase	36,36	36,36%
		Persentase pendampingan di bidang registrasi pangan olahan yang efektif	100,00	Persentase	100,00	100,00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Registrasi Pangan Olahan	100,00	Nilai	75,00	75,00%
1.12	Registrasi Obat	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Registrasi Obat	3,05	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Registrasi Obat	4,80	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Registrasi Obat	91,60	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase inspeksi sentra uji klinik dan bioekivalensi yang ditindaklanjuti memenuhi timeline	81,50	Persentase	33,33	40,90%
		Persentase Keputusan Registrasi Obat yang Diselesaikan Sesuai ketentuan	97,65	Persentase	82,96	84,96%
		Persentase obat yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	98,06	Persentase	82,48	84,11%
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Registrasi Obat	100,00	Persentase	36,00	36,00%
		Persentase pengawalan hilirisasi obat pengembangan baru melalui registrasi yang dikawal sesuai standar	55	Persentase	50,67	92,13%
		Tingkat efisensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Obat	100	Nilai	90,00	90,00%
1.13	Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Manajemen Risiko Dit. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2,99	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2026	Satuan	Realisasi s.d TW I 2026	Capaian (%)
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	4,96	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Dit. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	91,7	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat bahan alam	91,00	Persentase	91,09	100,10%
		Persentase keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) yang diselesaikan sesuai standar	53,00	Persentase	24,41	46,06%
		Persentase kosmetik yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	96,00	Persentase	89,57	93,30%
		Persentase obat bahan alam yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	75,40	Persentase	45,98	60,98%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Dit. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sesuai standar	100	Persentase	36,00	36,00%
		Persentase pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, notifikasi kosmetik, penilaian uji praklinik/klinik OBA, SK, dan Kosmetik, serta penilaian DIP yang efektif	91,50	Persentase	92,92	101,55%
		Persentase suplemen kesehatan yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	80,30	Persentase	45,92	57,19%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100	Nilai	100,00	100,00%
1.14	Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	2,95	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	4,96	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2026	Satuan	Realisasi s.d TW I 2026	Capaian (%)
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	89,50	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	100,00	Persentase	36,00	36,00%
		Persentase standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang disusun sesuai timeline tahapan penyusunan	100,00	Persentase	39,00	39,00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	100,00	Nilai	75,00	75,00%
1.15	Standardisasi Pangan Olahan	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Standardisasi pangan olahan	3,00	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	4,94	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Jumlah regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	1,00	Jumlah	Akhir tahun	Akhir tahun
		Jumlah regulasi terkait pengaturan label produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi kesehatan	1,00	Jumlah	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Standardisasi pangan olahan	90,30	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai tahapan	100,00	Persentase	15,00	15,00%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Standardisasi pangan olahan sesuai standar	100,00	Persentase	36,00	36,00%
		Persentase standar pangan olahan yang disusun sesuai timeline tahapan penyusunan	100,00	Persentase	33,37	33,37%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi pangan olahan	100,00	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2026	Satuan	Realisasi s.d TW I 2026	Capaian (%)
1.16	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	3,53	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik Direktorat Standardisasi ONPPZA	4,86	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	92,93	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	100,00	Persentase	36,36	36,36%
		Persentase Standar Obat, NPPZA yang disusun sesuai timeline tahapan penyusunan	100,00	Persentase	39,00	39,00%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	100,00	Nilai	92,00	92,00%
1.17	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	3,75	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	4,94	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	91,31	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	80,31	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif	19,46	Persentase	20,00	102,77%
		Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan pre-market PIRT sesuai standar	7,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Kader Keamanan Pangan Nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan	82,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2026	Satuan	Realisasi s.d TW I 2026	Capaian (%)
		Persentase pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat di bidang Pangan Olahan yang dilakukan oleh UPT sesuai pedoman	90,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan sesuai standar	100,00	Persentase	36,36	36,36%
		Tingkat efektivitas KIE Pangan Olahan	87,92	Nilai	91,67	104,27%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	100,00	Nilai	75,00	75,00%
1.18	Pengujian Obat dan Makanan	Indeks Manajemen Risiko Balai Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	2,05	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi	2,05	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Manajemen Risiko Balai Pengujian Produk Biologi	2,05	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Manajemen Risiko PPPOMN	3,15	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik Balai Kalibrasi	4,45	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	4,86	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Produk Biologi	4,85	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4,90	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai AKIP Balai Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	75	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai AKIP Balai Kalibrasi	75,00	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai AKIP Balai Pengujian Produk Biologi	75	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai AKIP PPPOMN	80,83	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	5	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2026	Satuan	Realisasi s.d TW I 2026	Capaian (%)
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi	5,00	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Produk Biologi	5,00	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	5,00	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi	77	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Balai Pengujian Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	77,10	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Balai Pengujian Produk Biologi	76,70	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI PPPOMN	90,41	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	83,75	Nilai	82,51	98,52%
		Nilai Pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72,10	Nilai	71,33	98,93%
		Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Balai Kalibrasi	92,60	Nilai	89,87	97,05%
		Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Pengujian Produk Biologi	92,10	Nilai	91,98	99,87%
		Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar	98	Persentase	99,05	101,07%
		Persentase baku pembanding yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	84,44	Persentase	82,04	97,16%
		Persentase Keputusan Hasil Evaluasi Produk Biologi dalam rangka Lot Release yang Diselesaikan sesuai Standar	99,45	Persentase	99,39	99,94%
		Persentase Metode Analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	85,28	Persentase	83,45	97,85%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2026	Satuan	Realisasi s.d TW I 2026	Capaian (%)
		Persentase Metode Analisis yang Dikembangkan terhadap Kebutuhan Metode Pengujian di Balai Pengujian Produk Biologi	78,10	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	55,17	Persentase	16,20	29,36%
		Persentase Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang ditindaklanjuti sesuai standar	91,50	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Sampel Balai Pengujian Produk Biologi yang Diselesaikan sesuai Standar	91,30	Persentase	100,00	109,53%
		Persentase sampel khusus/kasus yang ditindaklanjuti sesuai standar	99,4	Persentase	100,00	100,60%
1.19	Penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Penyidikan	2,88	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai pembangunan ZI Direktorat Penyidikan	87,22	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	85,00	Persentase	15,71	18,48%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Penyidikan sesuai standar	100,00	Persentase	36,00	36,00%
		Persentase pendampingan UPT dalam proses penyidikan yang ditindaklanjuti	80,00	Persentase	20,00	25,00%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Penyidikan	100,00	Nilai	100,00	100,00%
1.20	Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	3,38	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	86,00	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	81,00	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	5,00	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2026	Satuan	Realisasi s.d TW I 2026	Capaian (%)
		Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dimanfaatkan	87,50	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis pimpinan	91,70	Nilai	87,53	95,45%
1.21	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	Indeks Manajemen Risiko Dit. PMPU OT, SK, Kos	2,85	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	4,89	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Dit. PMPU OT, SK, Kos	87,92	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMKM OBA dan Kos	77,00	Persentase	4,20	5,45%
		Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pemberdayaan Masyarakat di bidang OBA	0,90	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pemberdayaan UMKM OBA	0,90	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat di bidang OBA, SK, Kos yang dilakukan oleh UPT sesuai pedoman	71,00	Persentase	5,60	7,89%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP PMPU OT, SK, Kos sesuai standar	100	Persentase	36,00	36,00%
		Persentase Penyuluh/Kader/Duta OBA, SK dan Kos aman yang berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat	100,00	Persentase	5,10	5,10%
		Tingkat efektivitas KIE Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	90,63	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. PMPU OT, SK, Kos	100	Nilai	75,00	75,00%
1.22	Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Siber	2,94	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai pembangunan ZI Direktorat Siber	83,60	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2026	Satuan	Realisasi s.d TW I 2026	Capaian (%)
		Persentase Hasil Patroli Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti	83,90	Persentase	79,76	95,07%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Siber sesuai standar	100	Persentase	36,36	36,36%
		Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan	89,11	Persentase	94,74	106,32%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Siber	100	Nilai	75,00	75,00%
B	Program Dukungan Manajemen	Indeks Manajemen Risiko Sekretariat Utama	2,94	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Opini Publik	79,20	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik Sekretariat Utama	4,97	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	32,94	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	5,00	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Sekretariat Utama	87,65	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai AKIP Sekretariat Utama	81,88	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Kerja Sama yang Efektif	91,00	Persentase	50,50	55,49%
		Persentase UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif	96,05	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88,74	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3,52	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama	17,07	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2026	Satuan	Realisasi s.d TW I 2026	Capaian (%)
		Nilai AKIP Inspektorat Utama	83,16	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	2,74	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	5,00	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Inspektorat Utama	86,39	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai telaah seawat intern Inspektorat Utama	85,28	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100,00	Persentase	104,88	104,88%
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100,00	Persentase	100,00	100,00%
		Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti	98,56	Persentase	99,51	100,96%
2.1	Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM	Indeks Kepuasan Media	81,41	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Manajemen Risiko Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	2,97	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	84,55	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Kerja Sama Pembangunan dengan Regulator Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Negara Berkembang yang ditindaklanjuti	40,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	Persentase	80,20	88,13%
		Persentase Kualitas Pemberitaan BPOM di Media	99,87	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat sesuai standar	100,00	Persentase	36,00	36,00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2026	Satuan	Realisasi s.d TW I 2026	Capaian (%)
		Persentase peran aktif BPOM dalam kerja sama Internasional di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	91,00	Persentase	20,81	22,87%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	100,00	Nilai	100,00	100,00%
2.2	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	Indeks Manajemen Risiko Biro Perencanaan dan Keuangan	3,60	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Perencanaan Pembangunan	5,00	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPOM komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja	62,05	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran BPOM	92,10	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPOM	96,60	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan Zona Integritas Biro Perencanaan dan Keuangan	88,50	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	4,00	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase dokumen Manajemen Risiko BPOM yang diselesaikan sesuai standar	100,00	Persentase	25,00	25,00%
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Pemerintah Daerah yang diselesaikan	100,00	Persentase	20,00	20,00%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai standar	100,00	Persentase	36,36	36,36%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	100,00	Nilai	100,00	100,00%
2.3	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana	Indeks Kepuasan Masyarakat BPOM	94,00	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2026	Satuan	Realisasi s.d TW I 2026	Capaian (%)
		Indeks Manajemen Risiko Biro Hukum dan Organisasi	3,40	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik Biro Hukum dan Organisasi	4,97	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik BPOM	4,76	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Reformasi Hukum	100,00	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Jumlah Kebijakan Reformasi birokrasi yang ditetapkan	2,00	Jumlah	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai pembangunan ZI Biro Hukum dan Organisasi	92,90	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM	4,36	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Bantuan Hukum yang ditindaklanjuti	100,00	Persentase	100,00	100,00%
		Persentase Dokumen Penataan Organisasi yang dihasilkan	100,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,71	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Pemenuhan dokumen SAKIP Biro Hukum dan Organisasi sesuai standar	100,00	Persentase	36,00	36,00%
		Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang diselesaikan	100,00	Persentase	100,00	100,00%
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai sistem manajemen pengawasan obat dan makanan terintegrasi	100,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase UPT yang melaksanakan KIE sesuai pedoman	93,42	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organisasi	100,00	Nilai	75,00	75,00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2026	Satuan	Realisasi s.d TW I 2026	Capaian (%)
		Tingkat Kepatuhan Standar Layanan Publik	93,75	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Tingkat Tindak Lanjut pengaduan pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	5	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
2.4	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Indeks Kesejahteraan Pegawai	3,34	Indeks	100,00	2994,01%
		Indeks Manajemen Risiko Biro Sumber Daya Manusia	3,75	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Sistem Merit	0,65	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Biro Sumber Daya Manusia	88,32	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Biro Sumber Daya Manusia sesuai standar	100,00	Persentase	36,00	36,00%
		Persentase SDM BPOM yang Dikembangkan Kariernya Sesuai Ketentuan	91,00	Persentase	8,36	9,19%
		Persentase SDM BPOM Yang Terpetakan Sebagai Suksesor	100,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Talent BPOM yang Dikembangkan Kariernya Melalui Talent Mobility Internal dan Eksternal	22	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Sumber Daya Manusia	100,00	Nilai	100,00	100,00%
2.5	Pengembangan SDM Aparatur BPOM	Indeks BerAKHLAK	67,00	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Manajemen Risiko PPSDM	3,10	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik PPSDM POM	4,96	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai AKIP PPSDM	81,00	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Kinerja Anggaran PPSDM	5,00	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI PPSDM	88,75	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2026	Satuan	Realisasi s.d TW I 2026	Capaian (%)
		Persentase SDM BPOM yang dikembangkan kompetensinya sesuai dengan perencanaan	80,00	Persentase	20,71	25,89%
		Persentase SDM Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Memenuhi Standar Kompetensi	89,00	Persentase	89,70	100,79%
2.6	Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan	Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi	2,97	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	3,00	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pemerintah Digital	2	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	80,11	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	5,00	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	86,73	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase data dan sistem informasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang andal dan terintegrasi	100,00	Persentase	25,00	25,00%
		Persentase Pemenuhan Layanan Publik yang Terintegrasi dengan nasional	100,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase pemenuhan tata kelola TIK BPOM yang terstandar	100,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
2.7	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat I	88,52	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I	3,69	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20,76	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	4,14	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Inspektorat I	86,89	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2026	Satuan	Realisasi s.d TW I 2026	Capaian (%)
		Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	80,53	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai telaah seawat intern Inspektorat I	86,36	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM	33,33	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti tepat waktu	100,00	Persentase	107,25	107,25%
		Persentase pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat I yang sesuai standar	100,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat I sesuai standar	100,00	Persentase	36,36	36,36%
		Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100,00	Persentase	100,00	100,00%
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	96,97	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase rekomendasi pengawasan assurance pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti	98,66	Persentase	99,14	100,49%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I	100,00	Nilai	100,00	100,00%
2.8	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II	88,94	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II	3,52	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2026	Satuan	Realisasi s.d TW I 2026	Capaian (%)
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20,76	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	4,14	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II	85,90	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	80,53	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai telaah sejawat intern Inspektorat II	84,20	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM	33,33	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	100,00	Persentase	102,50	102,50%
		Persentase pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat II yang sesuai standar	100,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat II sesuai standar	100,00	Persentase	36,36	36,36%
		Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100,00	Persentase	100,00	100,00%
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	96,97	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase rekomendasi pengawasan assurance pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti	98,46	Persentase	99,92	101,48%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	100,00	Nilai	75,00	75,00%
2.9	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Indeks Manajemen Risiko Biro Umum	2,60	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pengelolaan Aset	3,79	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	88,26	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2026	Satuan	Realisasi s.d TW I 2026	Capaian (%)
		Nilai Pembangunan ZI Biro Umum	84,00	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Keberhasilan Koordinasi Dalam Layanan Keprotokolan dan Kesekretariatan Pimpinan	97,93	Persentase	97,93	100,00%
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Biro Umum sesuai Standar	100,00	Persentase	36,00	36,00%
		Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Perencanaan	100,00	Persentase	37,84	37,84%
		Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	63,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Tingkat Digitalisasi Arsip	96,82	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Umum	100,00	Nilai	95,00	95,00%

LAMPIRAN 2



Peringkat Realisasi Anggaran Unit Kerja Pusat

No	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
1	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	710.609.236.000	710.609.236.000	184.738.258.229	26,00%	26,00%
2	INSPEKTORAT I	12.034.835.000	12.034.835.000	2.888.958.797	24,00%	24,00%
3	DIREKTORAT SIBER OBAT DAN MAKANAN	4.254.305.000	4.254.305.000	983.447.324	23,12%	23,12%
4	DIREKTORAT STANDADISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	7.030.866.000	6.920.866.000	1.536.406.297	21,85%	22,20%
5	DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK	4.323.218.000	3.097.693.000	663.037.575	15,34%	21,40%
6	PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN	5.839.968.000	5.839.968.000	1.232.147.519	21,10%	21,10%
7	BIRO HUKUM DAN ORGANISASI	2.153.238.000	2.153.238.000	453.911.509	21,08%	21,08%
8	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	14.150.942.000	14.150.942.000	2.853.581.574	20,17%	20,17%
9	BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	5.356.214.000	4.485.600.000	871.569.426	16,27%	19,43%
10	DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHAN	5.088.392.000	4.313.697.000	834.929.342	16,41%	19,36%
11	DIREKTORAT CEGAH TANGKAL	3.315.753.000	3.315.753.000	581.007.412	17,52%	17,52%
12	BIRO KERJASAMA	1.513.114.000	1.513.114.000	257.661.436	17,03%	17,03%
13	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	27.317.895.000	26.579.452.000	4.481.330.065	16,40%	16,86%
14	DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	5.495.494.000	5.302.269.000	868.434.954	15,80%	16,38%
15	DIREKTORAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN	3.601.455.000	3.601.455.000	566.426.399	15,73%	15,73%
16	DIREKTORAT REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	6.652.870.000	4.782.600.000	737.243.587	11,08%	15,42%
17	BALAI KALIBRASI	5.054.754.000	5.033.345.000	745.184.200	14,74%	14,80%
18	DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN	4.303.673.000	3.240.473.000	478.429.585	11,12%	14,76%

No	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap p Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
19	BIRO UMUM	142.964.769.000	138.586.213.000	19.012.246.392	13,30%	13,72%
20	BALAI PENGUJIAN PRODUK BIOLOGI	6.532.257.000	6.382.415.000	835.630.331	12,79%	13,09%
21	PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	34.955.377.000	34.955.377.000	4.500.458.380	12,87%	12,87%
22	DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN	4.260.110.000	3.724.121.000	464.942.516	10,91%	12,48%
23	INSPEKTORAT II	1.186.840.000	1.186.840.000	140.182.089	11,81%	11,81%
24	DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR	3.536.213.000	2.531.124.000	290.764.721	8,22%	11,49%
25	DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN	4.057.284.000	3.149.971.000	341.467.802	8,42%	10,84%
26	DIREKTORAT INTELIJEN	2.723.585.000	2.723.585.000	278.598.700	10,23%	10,23%
27	DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK	3.453.920.000	3.453.920.000	348.516.610	10,09%	10,09%
28	DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN	6.193.999.000	5.552.438.000	544.549.753	8,79%	9,81%
29	DIREKTORAT REGISTRASI OBAT	6.934.413.000	5.248.376.000	512.845.163	7,40%	9,77%
30	DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT. NARKOTIKA. PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR	4.332.681.000	3.695.625.000	315.489.938	7,28%	8,54%
31	BALAI PENGUJIAN KHUSUS OBAT DAN MAKANAN	13.949.814.000	13.949.814.000	884.670.346	6,34%	6,34%
32	DIREKTORAT PENGAWASAN KEAMANAN. MUTU DAN EKSPOR IMPOR OBAT. NARKOTIKA. PSIKOTROPIKA. PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	4.190.610.000	3.418.970.000	170.070.311	4,06%	4,97%
33	DIREKTORAT PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN	206.087.312.000	204.565.547.000	294.322.933	0,14%	0,14%

Peringkat Realisasi Anggaran Balai Besar/Balai POM

No	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
1	BALAI POM DI TABALONG	3.312.830.000	3.312.830.000	1.074.754.903	32,44%	32,44%
2	BALAI POM DI DUMAI	3.889.304.000	3.889.304.000	1.106.798.265	28,46%	28,46%
3	BALAI POM DI TANJUNGBALAI	3.031.186.000	3.031.186.000	843.434.245	27,83%	27,83%
4	BALAI POM DI BALIKPAPAN	3.228.932.000	3.228.932.000	893.618.306	27,68%	27,68%
5	BALAI POM DI BAU-BAU	3.902.556.000	3.902.556.000	1.063.709.073	27,26%	27,26%
6	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MATARAM	15.426.517.000	15.190.315.000	4.033.131.746	26,14%	26,55%
7	BALAI POM DI PALOPO	6.492.509.000	6.492.509.000	1.713.271.927	26,39%	26,39%
8	BALAI POM DI BIMA	3.515.168.000	3.515.168.000	916.159.548	26,06%	26,06%
9	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	17.055.549.000	16.701.810.000	4.284.262.901	25,12%	25,65%
10	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DENPASAR	20.679.129.000	20.288.832.000	5.109.717.261	24,71%	25,18%
11	BALAI POM DI TULANG BAWANG	3.066.403.000	3.066.403.000	736.829.630	24,03%	24,03%
12	BALAI POM DI BOGOR	8.417.697.000	8.417.697.000	1.942.357.034	23,07%	23,07%
13	BALAI POM DI SANGGAU	3.492.249.000	3.492.249.000	789.669.381	22,61%	22,61%
14	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALEMBANG	17.950.284.000	17.872.730.000	4.026.615.160	22,43%	22,53%
15	BALAI POM DI TANGERANG	7.196.066.000	7.196.066.000	1.609.274.524	22,36%	22,36%
16	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	32.796.869.000	32.480.885.000	7.211.414.000	21,99%	22,20%
17	BALAI POM DI ENDE	5.880.061.000	5.880.061.000	1.286.631.746	21,88%	21,88%

No	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
18	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK	18.076.639.000	17.920.692.000	3.800.267.900	21,02%	21,21%
19	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKARAYA	15.575.335.000	15.555.335.000	3.289.203.265	21,12%	21,15%
20	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	28.357.858.000	28.108.335.000	5.584.593.476	19,69%	19,87%
21	BALAI POM DI BANYUMAS	8.083.498.000	8.083.498.000	1.599.855.333	19,79%	19,79%
22	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MANADO	21.076.887.000	20.163.303.000	3.937.699.347	18,68%	19,53%
23	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG	17.445.188.000	17.436.188.000	3.393.892.578	19,45%	19,46%
24	BALAI POM DI KEDIRI	6.373.759.000	6.373.759.000	1.230.909.029	19,31%	19,31%
25	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SAMARINDA	18.348.067.000	18.296.315.000	3.522.829.580	19,20%	19,25%
26	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG	29.134.398.000	28.631.728.000	5.454.025.763	18,72%	19,05%
27	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	33.799.027.000	33.630.667.000	6.289.029.478	18,61%	18,70%
28	BALAI BESAR POM DI KUPANG	16.857.474.000	16.241.170.000	3.004.829.140	17,82%	18,50%
29	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KENDARI	14.840.339.000	14.787.009.000	2.730.132.237	18,40%	18,46%
30	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN YOGYAKARTA	21.971.093.000	21.425.406.000	3.930.391.868	17,89%	18,34%
31	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PEKAN BARU	24.683.247.000	24.438.868.000	4.474.310.828	18,13%	18,31%
32	BALAI POM DI JEMBER	5.711.953.000	5.711.953.000	1.035.561.892	18,13%	18,13%
33	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM	16.899.707.000	16.726.638.000	3.013.612.214	17,83%	18,02%
34	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN	25.417.264.000	25.224.296.000	4.534.702.142	17,84%	17,98%
35	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN	9.198.584.000	9.198.584.000	1.652.166.191	17,96%	17,96%
36	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG	17.864.531.000	17.726.331.000	3.164.095.666	17,71%	17,85%
37	BALAI BESAR POM DI GORONTALO	12.695.114.000	12.630.193.000	2.240.842.947	17,65%	17,74%
38	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU	10.317.996.000	10.317.996.000	1.799.581.509	17,44%	17,44%

No	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
39	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SOFIFI	9.957.337.000	9.957.337.000	1.683.758.659	16,91%	16,91%
40	BALAI BESAR POM DI BANJARBARU	19.135.148.000	18.794.143.000	3.162.714.581	16,53%	16,83%
41	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI	16.868.301.000	16.637.801.000	2.718.119.607	16,11%	16,34%
42	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON	14.640.686.000	14.579.886.000	2.347.964.084	16,04%	16,10%
43	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADANG	21.869.357.000	21.359.466.000	3.416.439.802	15,62%	15,99%
44	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG	11.688.120.000	11.599.770.000	1.814.047.701	15,52%	15,64%
45	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BENGKULU	16.407.357.000	16.302.942.000	2.477.349.086	15,10%	15,20%
46	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALU	15.940.225.000	15.855.120.000	2.324.238.872	14,58%	14,66%
47	BALAI POM DI SURAKARTA	8.290.341.000	8.290.341.000	1.200.072.374	14,48%	14,48%
48	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAMBI	14.359.754.000	14.260.217.000	1.971.082.898	13,73%	13,82%
49	BALAI POM DI PAYAKUMBUH	25.145.339.000	25.145.339.000	2.923.912.998	11,63%	11,63%
50	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA	21.618.381.000	21.388.039.000	2.395.913.841	11,08%	11,20%
51	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAKASSAR	62.135.532.000	61.649.549.000	4.609.464.591	7,42%	7,48%
52	BALAI POM DI TASIKMALAYA	22.978.239.000	22.978.239.000	1.514.436.529	6,59%	6,59%
53	BALAI POM DI INDRAGIRI HULU	22.111.387.000	22.111.387.000	1.052.184.389	4,76%	4,76%

Peringkat Realisasi Anggaran Loka POM

No	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
1	LOKA POM DI KABUPATEN MIMIKA	3.610.270.000	3.610.270.000	1.080.058.700	29,92%	29,92%
2	LOKA POM DI KABUPATEN BUNGO	2.996.432.000	2.996.432.000	874.454.798	29,18%	29,18%
3	LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU	3.023.049.000	3.023.049.000	864.190.591	28,59%	28,59%
4	LOKA POM DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR	2.960.773.000	2.960.773.000	840.394.240	28,38%	28,38%
5	LOKA POM DI ACEH SELATAN	3.233.828.000	3.233.828.000	901.014.709	27,86%	27,86%
6	LOKA POM DI KABUPATEN BANGGAI	2.830.546.000	2.830.546.000	762.107.285	26,92%	26,92%
7	LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI	2.939.863.000	2.939.863.000	790.922.412	26,90%	26,90%
8	LOKA POM DI KABUPATEN SIJUNJUNG	3.071.686.000	3.071.686.000	805.083.446	26,21%	26,21%
9	LOKA POM DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT	3.388.519.000	3.388.519.000	864.885.637	25,52%	25,52%
10	LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	3.210.633.000	3.210.633.000	801.505.213	24,96%	24,96%
11	LOKA POM DI KABUPATEN BELITUNG	2.925.355.000	2.925.355.000	720.422.292	24,63%	24,63%
12	LOKA POM DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	3.174.708.000	3.174.708.000	763.901.910	24,06%	24,06%
13	LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG	4.000.413.000	4.000.413.000	800.722.951	20,02%	20,02%
14	LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE	3.615.151.000	3.615.151.000	579.491.758	16,03%	16,03%
15	LOKA POM DI KABUPATEN SORONG	8.484.069.000	8.484.069.000	1.171.087.153	13,80%	13,80%
16	LOKA POM DI ACEH TENGAH	7.013.182.000	7.013.182.000	605.174.430	8,63%	8,63%
17	LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR	10.598.146.000	10.598.146.000	660.432.179	6,23%	6,23%
18	LOKA POM DI KABUPATEN TANAH BUMBU	18.023.595.000	18.023.595.000	772.331.826	4,29%	4,29%
19	LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG	21.586.584.000	21.586.584.000	856.715.393	3,97%	3,97%
20	LOKA POM DI KABUPATEN BULELENG	27.694.179.000	27.694.179.000	736.142.942	2,66%	2,66%



Halo BPOM : 1200533



website : www.pom.go.id



Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560, Indonesia